

LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DAFTAR ISI

Hal

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	iv
Kata Pengantar	v
Ringkasan Eksekutif	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	3

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis	13
1. Visi dan Misi	13
2. Tujuan dan Sasaran	14
3. Kebijakan dan Program	15
B. Rencana Kinerja Tahun 2013	15
C. Penetapan Kinerja Tahun 2013	17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A.	Analisis Capaian Sasaran	19
B.	Akuntabilitas Keuangan	45

BAB V PENUTUP

Penutup	54
---------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran:

- Pengukuran Kinerja Ditjen PAUDNI Tahun 2013
- Kontrak Kinerja Dirjen PAUDNI Tahun 2013
- Rencana Kinerja Ditjen PAUDNI Tahun 2013

DAFTAR TABEL

No.	Nama Grafik	Halaman
Tabel 2.1	Sasaran dan Tujuan Strategis Ditjen PAUDNI	14
Tabel 2.2	Rencana Kinerja Tahunan Ditjen PAUDNI Tahun 2013	16
Tabel 2.3	Penetapan Kinerja Ditjen PAUDNI Tahun 2013	17
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja Tahun 2013	19

DAFTAR GRAFIK

No.	Nama Grafik	Halaman
Grafik 3.1	APK PAUD Kemdikbud	21
Grafik 3.2	Perkembangan Desa yang Belum ada PAUD	22
Grafik 3.3	Perkembangan Lembaga PAUD	22
Grafik 3.4	Persentase Realisasi Peserta Kursus dan Pelatihan Berbasis PKH	24
Grafik 3.5	Jumlah peserta didik kursus dan pelatihan memperoleh sertifikasi kompetensi	26
Grafik 3.6	Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan Berkinerja A dan B	27
Grafik 3.7	Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Berkinerja A dan B	27
Grafik 3.8	Persentase menurunnya penduduk tuna aksara usia 15-59 tahun	29
Grafik 3.9	Persentase Kab/Kota yang telah menerapkan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan	33
Grafik 3.10	Persentase kab/Kota yang menyelenggarakan program Pendidikan Keorangtwaan (<i>Parenting Education</i>)	34
Grafik 3.11	Persentase PKBM ber-Nomor Induk Lembaga	36
Grafik 3.12	Persentase Kab/Kota yang telah Memiliki Minimal 10 TBM	37
Grafik 3.13	Persentase PTK PAUDNI yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	39
Grafik 3.14	Persentase PTK PAUDNI Memperoleh Penghargaan dan Peningkatan Kesejahteraan	40
Grafik 3.15	Jumlah Model dan Program PAUDNI yang dikembangkan	42
Grafik 3.16	Pagu Anggaran PAUDNI Per Jenis Belanja	45
Grafik 3.17	Distribusi Anggaran PAUDNI Per Kegiatan	46
Grafik 3.18	Realisasi Anggaran PAUDNI	46
Grafik 3.19	Perbandingan Realisasi Anggaran PAUDNI Tahun 2012 dan 2013	47

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Ditjen PAUDNI merupakan media pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Ditjen PAUDNI pada Tahun Anggaran 2013 dan memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah/lembaga negara yang dibiayai anggaran negara wajib menyampaikan laporan dimaksud.

Laporan ini menyajikan target dan capaian kinerja Ditjen PAUDNI seperti yang tertuang dalam Penetapan Kinerja (Kontrak Kinerja) Dirjen PAUDNI tahun 2013. Capaian kinerja yang disajikan berupa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ada di enam layanan kegiatan Ditjen PAUDNI yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran strategis.

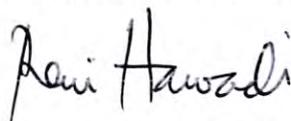
Capaian pelaksanaan dua belas sasaran strategis Ditjen PAUDNI yang perealisasiannya didukung oleh tiga belas indikator kinerja utama, hasilnya adalah: 9 indikator kinerja melebihi target, 3 indikator sesuai target, dan hanya 1 indikator kinerja tidak mencapai target.

Selain pencapaian tersebut diatas, Ditjen PAUDNI menyadari masih banyak tantangan dan pekerjaan rumah yang masih perlu diselesaikan serta memerlukan kerja keras dari semua satuan kerja di lingkungan Ditjen PAUDNI.

Oleh karena itu, melalui laporan tahun ke-empat pelaksanaan Rencana Strategis Ditjen PAUDNI tahun 2010-2014 ini, kami berharap dapat memberikan gambaran obyektif pencapaian kinerja Ditjen PAUDNI selama tahun anggaran 2013 sekaligus dapat dijadikan bahan evaluasi dan koreksi untuk mengetahui permasalahan maupun hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di setiap satuan kerja di lingkungan Ditjen PAUDNI, sehingga ke depan dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan pada sisa tahun berjalan.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan LAKIP Ditjen PAUDNI Tahun 2013 ini, baik kontribusi data dan laporan, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Februari 2014
Direktur Jenderal PAUDNI,



Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog
NIP. 19570322 198211 2 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Guna mempertanggungjawabkan kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Ditjen PAUDNI) dalam mencapai tujuan sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Ditjen PAUDNI tahun 2010-2014 disusunlah LAKIP Ditjen PAUDNI Tahun 2013, yang diukur dari pencapaian penetapan kinerja yang dibuat dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Ditjen PAUDNI tahun 2010-2014 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2013.

Kinerja tersebut juga memperhatikan misi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) tahun 2010-2014 (yang disingkat dengan misi 5K yaitu ketersediaan, keterjangkauan, kualitas/mutu dan relevansi, kesetaraan serta kepastian/keterjaminan di dalam memperoleh layanan pendidikan. Untuk mengukur pencapaian misi 5K tersebut, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dirinci melalui target setiap tahunnya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran kinerja hasil (*outcome*) yang ditetapkan pada unit kerja eselon I yang akan dicapai melalui kinerja keluaran (*output*) dari unit kerja eselon II di bawahnya berupa Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Ukuran kinerja Ditjen PAUDNI dinilai dari pencapaian lima layanan kegiatan yaitu layanan pendidikan anak usia dini, layanan pendidikan masyarakat, layanan kursus dan pelatihan, layanan penyediaan dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, layanan pengkajian, pengembangan dan pengendalian mutu PAUDNI serta layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Fungsi program pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal yang diemban oleh Ditjen PAUDNI adalah untuk memenuhi tujuan strategis (1) tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD bermutu dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota dan (2) tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Secara umum dari pelaksanaan dua belas sasaran strategis Ditjen PAUDNI yang perealisasinya didukung oleh tiga belas indikator kinerja utama, 9 indikator kinerja berhasil melebihi target, 3 indikator sesuai target, dan hanya 1 indikator kinerja utama kurang dari target. Ketiga belas capaian IKU tersebut seperti berikut:

A. IKU Melebihi Target

Berikut ini adalah 9 IKU yang melebihi target, yang diurut dari capaian tertinggi sampai terendah, terdiri dari 3 IKU Perluasan Akses dan 6 IKU Peningkatan Mutu dan Relevansi, yaitu:

1. Persentase PTK PAUDNI Memperoleh Penghargaan dan Peningkatan Kesejahteraan terealisasi 35,0% dari target 19%, dengan persentase kinerja 184,21%.
2. Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan Berkinerja A dan B terealisasi 11,75% dari target 9%, dengan persentase kinerja 130,6%.
3. Persentase PKBM ber-Nomor Induk Lembaga terealisasi 83% dari target 70%, dengan persentase kinerja 118,57%.
4. Jumlah Peserta Didik Kursus dan Pelatihan Memperoleh Sertifikat Kompetensi terealisasi 87.613 orang dari target 50.000 orang, dengan persentase kinerja 114,73%.
5. Persentase PTK PAUDNI yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi terealisasi 18,36% dari target 16,23%, dengan persentase kinerja 113,25%.
6. Persentase Kab/Kota yang telah Menyelenggarakan Pendidikan Keorangtuaan (*Parenting Education*) terealisasi 45,07% dari target 40%, dengan persentase kinerja 112,68%.
7. APK PAUD Kemdikbud usia 3-6 tahun terealisasi 68,10% dari target 61%, dengan persentase kinerja 111,64%.
8. Persentase Kab/Kota yang Telah Menerapkan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan terealisasi 64,78% dari target 61%, dengan persentase kinerja 106,2%.
9. Jumlah Model dan Program PAUDNI yang Dikembangkan di Tingkat Regional terealisasi 85 model dari target 82 model, dengan persentase kinerja 103,66%.

B. IKU Sesuai Target

Berikut ini adalah 3 IKU sesuai target, yang terdiri dari 2 IKU Perluasan Akses dan 1 IKU Peningkatan Mutu dan Relevansi, yaitu:

1. Persentase Penduduk Buta Aksara Usia 15-59 tahun terealisasi 4,03% dari target 4,03%, dengan persentase kinerja 100%.
2. Persentase Kab/Kota yang telah Memiliki Minimal 10 TBM terealisasi 59% dari target 59%, dengan persentase kinerja 100%.

3. Persentase Lembaga dan Program PAUDNI yang Mendapatkan Pemetaan Mutu terealisasi 14% dari target 14%, dengan persentase kinerja 100%.

C. IKU Tidak Mencapai Target

Berikut ini adalah IKU yang tidak mencapai target, yang merupakan IKU Perluasan Akses, yaitu:

1. Persentase Anak Lulus SMP Tidak Melanjutkan, Putus dan atau Lulus Sekolah Menengah Tidak Melanjutkan Mendapatkan Layanan Pendidikan Kecakapan Hidup terealisasi 3,43% dari target 3,46%%, dengan persentase kinerja 99,13%.

Terhadap IKU yang masih belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu “Persentase Anak Lulus SMP Tidak Melanjutkan, Putus dan atau Lulus Sekolah Menengah Tidak Melanjutkan Mendapatkan Layanan Pendidikan Kecakapan Hidup” perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui penyebab kegagalan dan permasalahan yang dihadapi sehingga ke depan dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan agar target tersebut dapat tercapai.

Satu IKU yang tidak mencapai target tersebut, tetapi memiliki nilai kurang 1 persen atau terpaut 0,87% untuk mencapai 100%. Hal ini dapat terjadi karena dukungan dana APBN untuk membiayai kegiatan tersebut belum sepenuhnya dapat terpenuhi. Oleh karena itu ke depan perlu dicarikan terobosan melalui dana non APBN seperti CSR, dll.

D. Prestasi Lain

Selain pencapaian target-target IKU dari enam layanan kegiatan seperti tercantum dalam penetapan kinerja, LAKIP Ditjen PAUDNI tahun 2013 juga menyampaikan kinerja lainnya yang berhasil dicapai, seperti penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Tingkat Madya dari Presiden Republik Indonesia atas prestasi dalam melaksanakan Pengarus-utamaan Gender Bidang Pendidikan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berisi pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi diperlukan di dalam upaya peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Sejalan dengan bergulirnya reformasi, pemerintah telah berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan dengan bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai dengan TAP MPR No. XI/MPR/1998.

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban publik merupakan salah satu bagian penting dalam pelaksanaan pemerintahan yang demokratis sebagai mekanisme untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Untuk itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan program dan kegiatan pendidikan, maka laporan akuntabilitas kinerja Ditjen PAUDNI disusun sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Instruksi Presiden tentang Akuntabilitas Kinerja ini diterbitkan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan target pembangunan secara efektif dan efisien. Dengan diberlakukannya pembangunan berbasis kinerja, maka penyusunan LAKIP menjadi salah satu instrumen teknis yang menjadi alat ukur keberhasilan pembangunan yang dijalankan oleh setiap unit instansi pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Selanjutnya, untuk memperkuat pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri ini memberikan landasan operasional dalam menyusun dan menetapkan serta mengevaluasi keberhasilan penyelenggaraan pembangunan.

Ditjen PAUDNI memiliki tanggung jawab dalam pengaturan norma, standar, kriteria, dan prosedur layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan

pendidikan nonformal untuk menentukan keberhasilan. Sekurang-kurangnya, kebijakan dan standardisasi teknis tersebut dapat menjadi arah dan pedoman, sekaligus indikator keberhasilan pelaksanaan program-program layanan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.

Masih belum optimalnya pelaksanaan *good governance* menyebabkan layanan pendidikan belum dapat dilaksanakan secara merata, bermutu, berkeadilan dan akuntabel. Sementara, kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal belum dapat direalisasikan secara optimal sebagai akibat rendahnya partisipasi masyarakat di bidang pendidikan. Kondisi ini terasa semakin berat apabila dikaitkan dengan pelaksanaan program di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang memiliki sasaran masyarakat marginal yang lemah secara ekonomis dan lemah dalam mengakses layanan pendidikan. Di samping itu, sebagian besar sasaran program pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal tinggal di daerah-daerah pedesaan yang terpencil dan terisolir.

Untuk mengatasi kelemahan dan tantangan tersebut, sekurang-kurangnya ada 2 (dua) persoalan yang harus dicermati agar program-program di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kedua persoalan itu adalah:

1. Penguatan kelembagaan dan personil PAUDNI; dan
2. Peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal. Persoalan ini semakin penting apabila dikaitkan dengan fungsi pendidikan nonformal sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal yang saling memperkaya. Di samping itu, pendidikan nonformal dan informal dilaksanakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Tahun 2013 melandaskan pada dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama
7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan LAKIP Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Tahun 2013 antara lain:

- a. sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja;
- b. sebagai penyempurnaan dokumen perencanaan untuk tahun yang akan datang;
- c. sebagai penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang; dan
- d. sebagai bahan pertimbangan untuk berbagai kebijakan yang diperlukan.

D. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendidikan anak usia dini formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 114 tersebut Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal;
3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pendidikan anak usia dini formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal;
4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan anak usia dini formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal; dan
5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.

Untuk memperlancar dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal PAUDNI memiliki kelengkapan organisasi yang terdiri atas: Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan serta Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI. Masing-masing unit kerja mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal juga didukung oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat yang berkedudukan di daerah, yaitu:

1. PP-PAUDNI (setingkat eselon II b), yaitu:
 - a. PP-PAUDNI Regional I Jayagiri, Bandung, Jawa Barat.
 - b. PP-PAUDNI Regional II Ungaran, Semarang, Jawa Tengah.
2. BP-PAUDNI (setingkat eselon III a), yaitu:
 - a. BP-PAUDNI Regional I Medan, Sumatera Utara.
 - b. BP-PAUDNI Regional II Surabaya, Jawa Timur.
 - c. BP-PAUDNI Regional III Makassar, Sulawesi Selatan.
 - d. BP-PAUDNI Regional IV Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
 - e. BP-PAUDNI Regional V Mataram, Nusa Tenggara Barat.
 - f. BP-PAUDNI Regional VI Sentani, Papua.

Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing organisasi adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif, serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal;
- b. koordinasi pemantauan dan evaluasi kebijakan, rencana, program, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal;
- c. pengelolaan data dan informasi pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal;
- d. koordinasi pelaksanaan tugas dan kerja sama di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal;
- e. pengelolaan keuangan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal;
- f. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan kajian hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal;
- g. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal;
- h. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal;
- i. koordinasi penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal;
- j. pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal; dan
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal.

Untuk memperlancar dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas 4 (empat) bagian, yaitu:

- a. Bagian Perencanaan dan Penganggaran;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Hukum dan Kepegawaian; dan
- d. Bagian Umum.

2. Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang pendidikan anak usia dini. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembelajaran, peserta didik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan kemitraan pendidikan anak usia dini;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembelajaran, peserta didik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan kemitraan pendidikan anak usia dini;
- c. fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembelajaran, peserta didik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan kemitraan pendidikan anak usia dini;
- d. evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembelajaran, peserta didik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan kemitraan pendidikan anak usia dini; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini.

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dibantu oleh beberapa unit eselon III, yaitu:

- a. Subdirektorat Program dan Evaluasi;
- b. Subdirektorat Pembelajaran dan Peserta Didik;
- c. Subdirektorat Sarana dan Prasarana;
- d. Subdirektorat Kelembagaan dan Kemitraan.

3. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang pendidikan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembelajaran, peserta didik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan kemitraan pendidikan masyarakat;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembelajaran, peserta didik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan kemitraan pendidikan masyarakat;
- c. fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembelajaran, peserta didik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan kemitraan pendidikan masyarakat;
- d. evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembelajaran, peserta didik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan kemitraan pendidikan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat.

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dibantu oleh beberapa unit eselon III, yaitu:

- a. Subdirektorat Program dan Evaluasi;
- b. Subdirektorat Pembelajaran dan Peserta Didik;
- c. Subdirektorat Sarana dan Prasarana;
- d. Subdirektorat Kelembagaan dan Kemitraan.

4. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan

Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang kursus dan pelatihan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembelajaran, peserta didik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan kemitraan kursus dan pelatihan;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembelajaran, peserta didik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan kemitraan kursus dan pelatihan;
- c. fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembelajaran, peserta didik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan kemitraan kursus dan pelatihan;
- d. evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, kriteria pembelajaran, peserta didik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan kemitraan kursus dan pelatihan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dibantu oleh beberapa unit eselon III, yaitu:

- a. Subdirektorat Program dan Evaluasi;
- b. Subdirektorat Pembelajaran dan Peserta Didik;
- c. Subdirektorat Sarana dan Prasarana;
- d. Subdirektorat Kelembagaan dan Kemitraan.

5. Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal

Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, kursus dan pelatihan, dan pendidikan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, kursus dan pelatihan, dan pendidikan masyarakat;

- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, kursus dan pelatihan, dan pendidikan masyarakat;
- c. penyusunan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, kursus dan pelatihan, dan pendidikan masyarakat;
- d. pengembangan sistem pembinaan peningkatan kualifikasi dan karir pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, kursus dan pelatihan, dan pendidikan masyarakat;
- e. pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, kursus dan pelatihan, dan pendidikan masyarakat;
- f. fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria kualifikasi dan karir pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, kursus dan pelatihan, dan pendidikan masyarakat;
- g. pelaksanaan pemberian penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, kursus dan pelatihan, dan pendidikan masyarakat;
- h. evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria kualifikasi dan karir serta evaluasi pemberian penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, kursus dan pelatihan, dan pendidikan masyarakat; dan
- i. pelaksanaan administrasi Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal.

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal dibantu oleh beberapa unit eselon III, yaitu:

- a. Subdirektorat Program dan Evaluasi;
- b. Subdirektorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD;
- c. Subdirektorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kursus dan Pelatihan;
- d. Subdirektorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Masyarakat.

6. Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPT Pusat)

Ditjen PAUDNI memiliki 8 (delapan) UPT Pusat yang dibedakan menjadi 2 (dua) jenis berdasarkan tingkat eselon yang disandang, yaitu: (1) PP-PAUDNI sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja **Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal**; dan (2) BP-PAUDNI sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja **Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal**. Masing-masing UPT Pusat mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

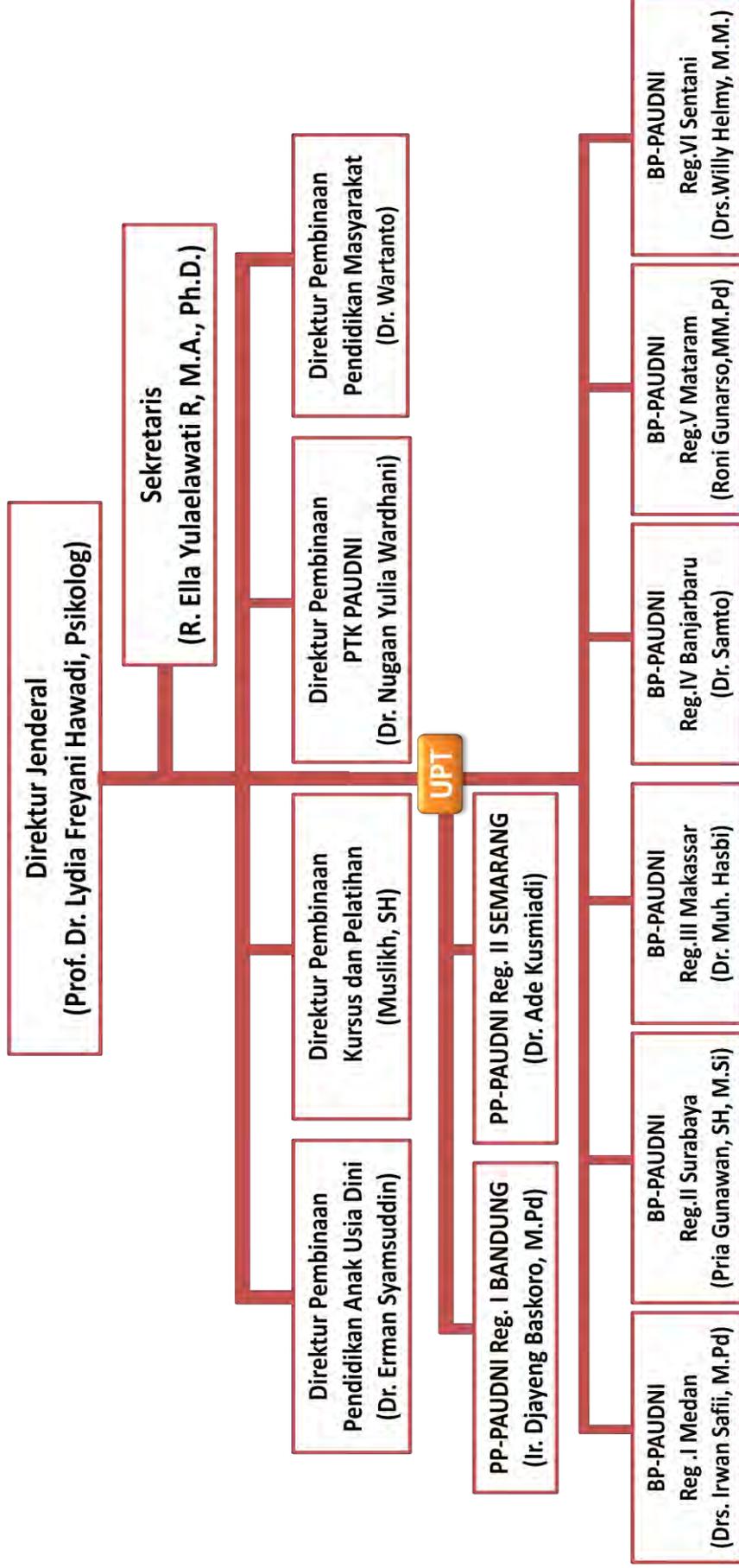
- a. PP-PAUDNI mempunyai tugas melaksanakan pemetaan mutu pendidikan, pengembangan program dan model pendidikan, supervisi, fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program, penerapan model, dan pengembangan sumber daya di bidang anak usia dini pendidikan nonformal dan informal. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, PP-PAUDNI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - 1) Pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal;
 - 2) Pengembangan program pendidikan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal;
 - 3) Pengembangan model pendidikan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal;
 - 4) Supervisi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal dalam pencapaian standar pendidikan nasional;
 - 5) Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program, dan pelaksanaan model pendidikan serta pengembangan pemberdayaan sumber daya di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal;
 - 6) Pengembangan dan pengelolaan sistim informasi di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal;
 - 7) Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal; dan
 - 8) Pelaksanaan urusan administrasi pusat.

b. BP-PAUDNI mempunyai tugas melaksanakan pemetaan mutu pendidikan, pengembangan program, supervisi, fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program, dan pengembangan sumber daya serta pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal. Dalam menyelenggarakan tugasnya, BP-PAUDNI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal;
- 2) Pengembangan program pendidikan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal;
- 3) Pengembangan model pendidikan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal;
- 4) Supervisi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal dalam pencapaian standar pendidikan nasional;
- 5) Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program, dan pelaksanaan model pendidikan serta pengembangan pemberdayaan sumber daya di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal;
- 6) Pengembangan dan pengelolaan sistim informasi di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal;
- 7) Pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal dan pendidikan informal; dan
- 8) Pelaksanaan urusan administrasi balai.

Struktur organisasi pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal dapat digambarkan sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL



BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Renstra Kemdikbud) mengatakan bahwa tujuan strategis yang harus dicapai oleh Kemdikbud tahun 2010-2014 dirumuskan berdasarkan jenjang layanan pendidikan dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima pendidikan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan visi 2014.

Dalam rangka penguatan hal tersebut, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Ditjen PAUDNI) juga menetapkan Rencana Strategis untuk tingkat Direktorat Jenderal.

1. Visi dan Misi

Visi Ditjen PAUDNI yakni “terselenggaranya layanan pendidikan untuk mewujudkan insan Indonesia yang cerdas, terampil, mandiri dan profesional”. Hal ini merupakan cita-cita untuk membangun pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal yang diarahkan pada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berakhlak mulia sebagai insan pembelajar sepanjang hayat yang mampu mengaktualisasikan dirinya secara optimal dalam berbagai keadaan dan tantangan di masa depan.

Misi Ditjen PAUDNI yakni “memfasilitasi layanan pendidikan kepada peserta didik secara merata, bermutu, relevan dan menjangkau sasaran yang tak terlayani oleh pendidikan formal melalui penyelenggaraan layanan pendidikan anak usia dini, penyediaan layanan pendidikan masyarakat, penyediaan layanan penyelenggaraan kursus dan pelatihan, penyediaan layanan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal, pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan dan potensi peserta didik”.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi sebagaimana dikemukakan di atas, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang terarah dan operasional berupa tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai selama satu sampai lima tahun sebagai berikut:

Tabel 2.1. Sasaran dan Tujuan Strategis Ditjen PAUDNI

NO	TUJUAN	SASARAN
1	Tersedia dan Terjangkaunya Layanan PAUD Bermutu dan Berkesetaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. APK PAUD Kemdikbud mencapai 72% 2. PTK PAUD yang mengikuti peningkatan kompetensi mencapai 44,63% 3. Sebanyak 15% PTK PAUD memperoleh penghargaan dan perlindungan
2	Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Orang Dewasa Berkelanjutan yang Berkesetaraan, Bermutu, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 4. Sebanyak 19% anak lulus SMP tidak melanjutkan, putus dan/atau lulus sekolah menengah tidak melanjutkan mendapatkan layanan pendidikan keterampilan 5. Sebanyak 60.000 peserta didik kursus dan pelatihan memperoleh sertifikat kompetensi 6. Sebanyak 20% lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi A dan B 7. Penduduk tuna aksara usia dewasa mencapai 3,83% 8. Sebanyak 68% Kab/Kota telah menerapkan pengarusutamaan gender bidang pendidikan 9. Sebanyak 50% Kab/Kota telah menyelenggarakan <i>parenting education</i> 10. PKBM bernomor induk lembaga mencapai 80% 11. Sebanyak 69% Kab/Kota telah memiliki minimal 10 TBM 12. PTK Nonformal dan informal yang mengikuti peningkatan kompetensi mencapai 44,63% 13. Sebanyak 15% PTK nonformal dan informal memperoleh penghargaan dan perlindungan 14. Jumlah model dan program nonformal dan informal yang dikembangkan di tingkat regional sebanyak 145 15. Sebanyak 20% lembaga dan program nonformal dan informal mendapatkan pemetaan mutu

3. Kebijakan dan Program

Program di lingkungan Ditjen PAUDNI merupakan program Kementerian yang teknis pelaksanaannya berada di Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.

Program ini dilaksanakan guna mendukung pencapaian dua tujuan Kementerian, yaitu:

- 1) Tersedia dan Terjangkaunya Layanan PAUD Bermutu dan Berkesetaraan di semua Provinsi, Kabupaten dan Kota
- 2) Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Orang Dewasa Berkelanjutan yang Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat.

Kementerian melaksanakan program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, dengan menetapkan enam kegiatan pendukung yang dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal dan empat direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal serta UPT yang ada di bawah tanggungjawabnya.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung Program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal adalah:

- 1) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal
- 2) Layanan Pengkajian, Pengembangan dan Pengendalian Mutu PAUDNI
- 3) Penyediaan Layanan PAUD
- 4) Penyediaan Layanan Kursus dan Pelatihan
- 5) Penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat
- 6) Penyediaan dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.

B. Rencana Kinerja Tahun 2013

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal PAUDNI tahun 2013 yang mengacu pada Rencana Strategis Ditjen PAUDNI 2010-2014 (sebelum revisi Renstra April 2013) sebagai berikut:

Tabel 2.2. Rencana Kinerja Tahunan Ditjen PAUDNI Tahun 2013

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
(1)		(2)	(3)
1	Meningkatnya APK PAUD Kemdikbud	APK PAUD Kemdikbud	61%
2	Meningkatnya Layanan Pendidikan Keterampilan Bagi Anak Lulusan SMP Tidak Melanjutkan, Putus dan atau Lulus Sekolah Menengah Tidak Melanjutkan yang Mendapatkan Layanan Pendidikan Keterampilan	Persentase Anak Lulus SMP Tidak Melanjutkan, Putus dan atau Lulus Sekolah Menengah Tidak Melanjutkan Mendapatkan Layanan Pendidikan Kecakapan Hidup	3,46%
3	Meningkatnya Jumlah Lulusan Kursus dan Pelatihan yang bersertifikat Kompetensi	Jumlah Peserta Didik Kursus dan Pelatihan Memperoleh Sertifikat Kompetensi	10.000
4	Meningkatnya Program Keahlian Lembaga Kursus dan Pelatihan Berakreditasi	Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan Berkinerja A dan B	9%
5	Menurunnya Tingkat Illiterasi Nasional Usia 15 Tahun	Persentase Penduduk Tuna Aksara Usia 15-59 tahun	4,03%
6	Meningkatnya Jumlah Kab/Kota yang Telah Mengarusutamakan Gender Bidang Pendidikan	Persentase Kab/Kota yang Telah Menerapkan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan	61%
7	Meningkatnya Kab/Kota yang memberikan layanan fasilitasi Pendidikan Keorangtuaan (<i>Parenting Education</i>)	Persentase Kab/Kota yang telah Menyelenggarakan Pendidikan Keorangtuaan (<i>Parenting Education</i>)	40%
8	Meningkatnya Jumlah PKBM berakreditasi	Persentase PKBM ber-Nomor Induk Lembaga	70%
9	Meningkatnya Kab/Kota yang telah Memiliki Minimal 10 TBM	Persentase Kab/Kota yang telah Memiliki Minimal 10 TBM	59%
10	Meningkatnya Jumlah PTK PAUDNI yang Bersertifikat Kompetensi	Persentase PTK PAUDNI yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	16,23%
11	Meningkatnya Jumlah PTK PAUDNI yang memperoleh penghargaan	Persentase PTK PAUDNI Memperoleh Penghargaan dan Peningkatan Kesejahteraan	19%
12	Meningkatnya Program PAUDNI yang bermutu	Jumlah Model dan Program PAUDNI yang Dikembangkan di Tingkat Regional	82
		Persentase Lembaga dan Program PAUDNI yang Mendapatkan Pemetaan Mutu	14%

C. Penetapan Kinerja Tahun 2013

Direktorat Jenderal PAUDNI menyusun perjanjian kinerja dalam bentuk Penetapan Kinerja tingkat Direktorat Jenderal yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Penetapan Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja Direktorat Jenderal yang dicapai dalam kurun waktu satu tahun sesuai dengan rencana strategis. Berikut adalah Penetapan Kinerja Ditjen PAUDNI Tahun 2013.

Tabel 2.3. Penetapan Kinerja Ditjen PAUDNI Tahun 2013

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
(1)		(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya APK PAUD Kemdikbud	APK PAUD Kemdikbud	61%	676.293.045.000
2	Meningkatnya Layanan Pendidikan Keterampilan Bagi Anak Lulusan SMP Tidak Melanjutkan, Putus dan atau Lulus Sekolah Menengah Tidak Melanjutkan yang Mendapatkan Layanan Pendidikan Keterampilan	Persentase Anak Lulus SMP Tidak Melanjutkan, Putus dan atau Lulus Sekolah Menengah Tidak Melanjutkan Mendapatkan Layanan Pendidikan Kecakapan Hidup	3,46%	149.677.000.000
3	Meningkatnya Jumlah Lulusan Kursus dan Pelatihan yang bersertifikat Kompetensi	Jumlah Peserta Didik Kursus dan Pelatihan Memperoleh Sertifikat Kompetensi	10.000	4.722.500.000
4	Meningkatnya Program Keahlian Lembaga Kursus dan Pelatihan Berakreditasi	Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan Berkinerja A dan B	9%	3.424.901.000
5	Menurunnya Tingkat Iliterasi Nasional Usia 15 Tahun	Persentase Penduduk Buta Aksara Usia 15-59 tahun	4,03%	154.429.864.000
6	Meningkatnya Jumlah Kab/Kota yang Telah Mengarusutamakan Gender Bidang Pendidikan	Persentase Kab/Kota yang Telah Menerapkan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan	61%	15.821.639.000

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
7	Meningkatnya Kab/Kota yang memberikan layanan fasilitas Pendidikan Keorngtuaan (<i>Parenting Education</i>)	Persentase Kab/Kota yang telah Menyelenggarakan Pendidikan Keorngtuaan (<i>Parenting Education</i>)	40%	5.806.677.000
8	Meningkatnya Jumlah PKBM berakreditasi	Persentase PKBM ber-Nomor Induk Lembaga	70%	27.298.716.000
9	Meningkatnya Kab/Kota yang telah Memiliki Minimal 10 TBM	Persentase Kab/Kota yang telah Memiliki Minimal 10 TBM	59%	20.560.027.000
10	Meningkatnya Jumlah PTK PAUDNI yang Bersertifikat Kompetensi	Persentase PTK PAUDNI yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	16,23%	136.530.343.000
11	Meningkatnya Jumlah PTK PAUDNI yang memperoleh penghargaan	Persentase PTK PAUDNI Memperoleh Penghargaan dan Peningkatan Kesejahteraan	19%	805.609.034.000
12	Meningkatnya Program PAUDNI yang bermutu	Jumlah Model dan Program PAUDNI yang Dikembangkan di Tingkat Regional	82	9.784.150.000
		Persentase Lembaga dan Program PAUDNI yang Mendapatkan Pemetaan Mutu	14%	3.000.944.000

Untuk melaksanakan program, kegiatan dan merealisasikan penetapan/perjanjian kinerja Direktorat Jenderal PAUDNI, selama tahun 2013, menggunakan pagu anggaran sejumlah Rp 2.408.034.530.000,- (Dua Trilyun Empat Ratus Delapan Miliar Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Analisis Capaian Sasaran

Sesuai dengan penetapan kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2013, Ditjen PAUDNI berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) target kinerja dan sebagai bahan evaluasi kinerja, dapat dilihat dari pencapaian dua belas sasaran strategis Ditjen PAUDNI seperti tabel pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja Tahun 2013

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya APK PAUD Kemendikbud	APK PAUD Kemendikbud	37,81%	37,83%	100,05	61%	68,1%	111,64
2	Anak Lulus SMP tidak melanjutkan, putus dan atau lulus sekolah menengah tidak melanjutkan mendapatkan layanan pendidikan keterampilan	Persentase Anak Lulus SMP Tidak Melanjutkan, Putus dan/ atau Lulus Sekolah Menengah Tidak Melanjutkan Mendapatkan Layanan Pendidikan Keterampilan	15%	4,74%	31,6	3,46%	3,43%	99,13
3	Meningkatnya Jumlah Lulusan Kursus dan Pelatihan yang bersertifikat Kompetensi	Jumlah Peserta Didik Kursus dan Pelatihan Memperoleh Sertifikat Kompetensi	40.000	58.953	147,38	10.000	11.473	114,73
4	Meningkatnya lembaga kursus dan pelatihan berkinerja A dan B	Persentase lembaga kursus dan pelatihan berkinerja A dan B	10%	8,64%	8,64	9%	11,75%	130,56
5	Menurunnya penduduk tuna aksara usia dewasa	Persentase penduduk tuna aksara usia dewasa	4,23%	4,21%	100,47	4,03%	4,03%	100
6	Meningkatnya Jumlah Kab/Kota yang Telah Mengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan	Persentase Kab/Kota yang Telah Menerapkan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan	54%	57,34%	117,7	61%	64,78%	106,2
7	Meningkatnya Kab/Kota yang memberikan layanan fasilitasi Pendidikan Keorngtuaan (Parenting Education)	Persentase Kab/Kota yang telah Menyelenggarakan Pendidikan Keorngtuaan (Parenting Education)	30%	32,39%	107,97	40%	45,07%	112,68

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2012			Tahun 2013		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
8	Meningkatnya Jumlah PKBM berakreditasi	Persentase PKBM ber-Nomor Induk Lembaga	60%	59,95%	99,91	70%	83%	118,57
9	Meningkatnya Kab/Kota yang telah Memiliki Minimal 10 TBM	Persentase kab/kota yang memiliki minimal 10 TBM	47%	47,19%	100,4	59%	59%	100
10	Meningkatnya Jumlah PTK PAUDNI yang Bersertifikat Kompetensi	Persentase PTK PAUDNI yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	28,27%	28,27%	100	16,23%	16,36%	113,12
11	Meningkatnya Jumlah PTK PAUDNI yang memperoleh penghargaan	Persentase PTK PAUDNI Memperoleh Penghargaan dan Peningkatan Kesejahteraan	35%	19,97%	57,06	19%	35%	184,21
12	Meningkatkan Program PAUDNI yang bermutu	Jumlah Model dan Program PAUDNI yang Dikembangkan di Tingkat Regional	76	80	105,26	82	85	103,66
		Persentase Lembaga dan Program PAUDNI yang Mendapatkan Pemetaan Mutu	10%	10%	100	14%	14%	100

Analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja kedua belas sasaran strategis Ditjen PAUDNI tahun 2013 tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1: Meningkatkan APK PAUD Kemdikbud

Untuk melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui tingkat pencapaian IKU “**Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Kemdikbud**”. Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya APK PAUD Kemdikbud	APK PAUD Kemdikbud	29,60%	25,80%	33,67%	29,60%	37,81%	37,83%	100,05	61%	68,10%	111,64

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa pencapaian “**APK PAUD Kemdikbud**” dapat direalisasikan sebesar 68,10% dari target tahun 2013 sebesar 61%, dengan persentase kinerja 111,64%. Dibanding tahun 2012 persentase kinerja tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 12,57%. Secara absolut jumlah anak usia 3-6 yang terlayani tersebut mencapai 12.612.586 anak dari total 18.520.685 anak, yang merupakan jumlah kumulatif dari tahun 2012 sebanyak 11.669.230 ditambah tahun 2013 sebanyak 943.356 anak. Jumlah 12.612.586

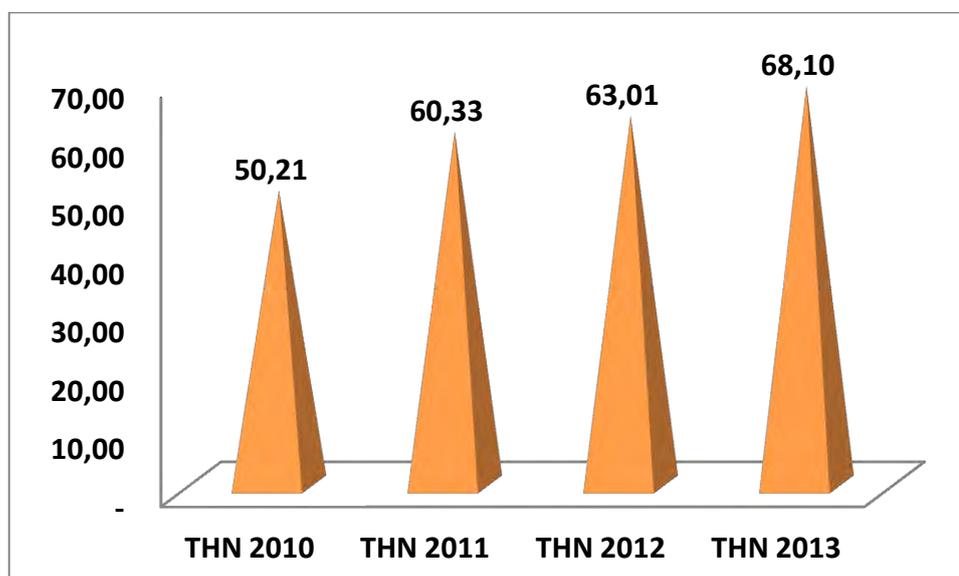
tersebut diperoleh melalui program pemberian BOP PAUD dan program satu desa satu PAUD.

Keberhasilan melebihi target tersebut salah satunya didukung oleh kebijakan pemerintah untuk menobatkan bunda-bunda PAUD di seluruh Indonesia baik di tingkat provinsi maupun kab/kota guna mensosialisasikan program PAUD, intervensi program seperti pemberian BOP PAUD dan program satu desa satu PAUD, serta adanya perubahan cara penghitungan APK PAUD, yang semula menghitung pembagiannya berdasarkan anak usia 0-6 tahun menjadi anak usia 3-6 tahun.

Perealisisan dari kedua komponen pendukung pencapaian target tersebut, dijelaskan bahwa pada tahun 2013 dari target 45.000 lembaga untuk BOP terealisasi sebanyak 48.575 lembaga, dengan persentase capaian kinerja 107.9%, sedangkan program satu desa satu PAUD mengalami peningkatan yang cukup signifikan, di mana pada tahun 2012 jumlah desa yang belum ada PAUD sebanyak 26.181 desa sedangkan pada tahun 2013 menjadi 23.727, sehingga ada penambahan sebanyak 2.447 desa. Dari penambahan tersebut dapat dilihat bahwa stimulus yang diberikan oleh pemerintah disambut baik oleh masyarakat yaitu dengan banyaknya kontribusi dari masyarakat melalui swadaya mendirikan lembaga-lembaga PAUD di desa-desa yang belum ada PAUD-nya. Hal ini berlanjut pada tahun 2013 dengan memberikan Bantuan Rintisan PAUD Baru sejumlah 1.491 lembaga dan telah terealisasi 100% yang tersebar di 497 kabupaten/kota.

Berikut tren peningkatan angka partisipasi kasar anak usia dini dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013.

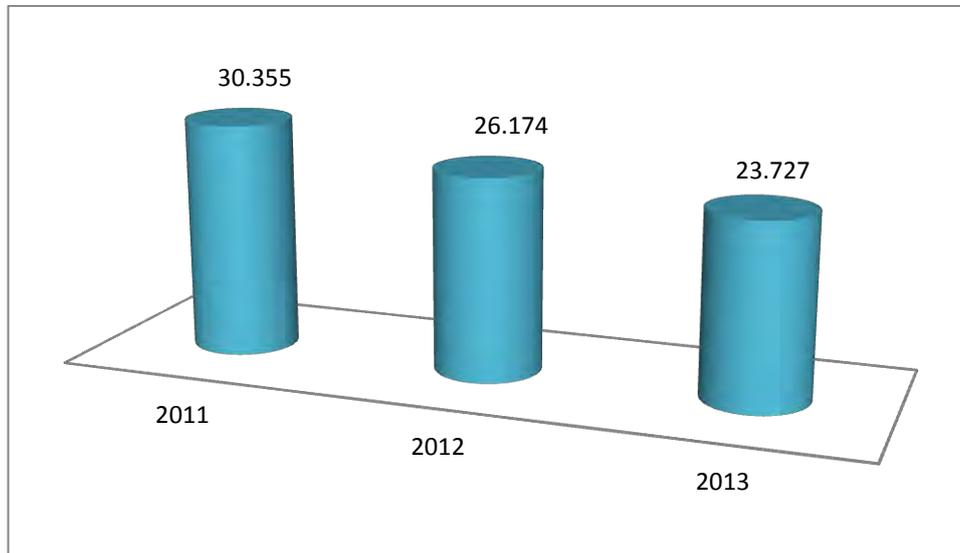
Grafik 3.1. APK PAUD Kemdikbud



Sumber data: PDSP dan Dit PAUD, 2013

Untuk melihat tren perkembangan jumlah desa yang belum ada PAUD-nya dari tahun 2011 sebagai data dasar dan pada akhir tahun 2013 sebagai berikut.

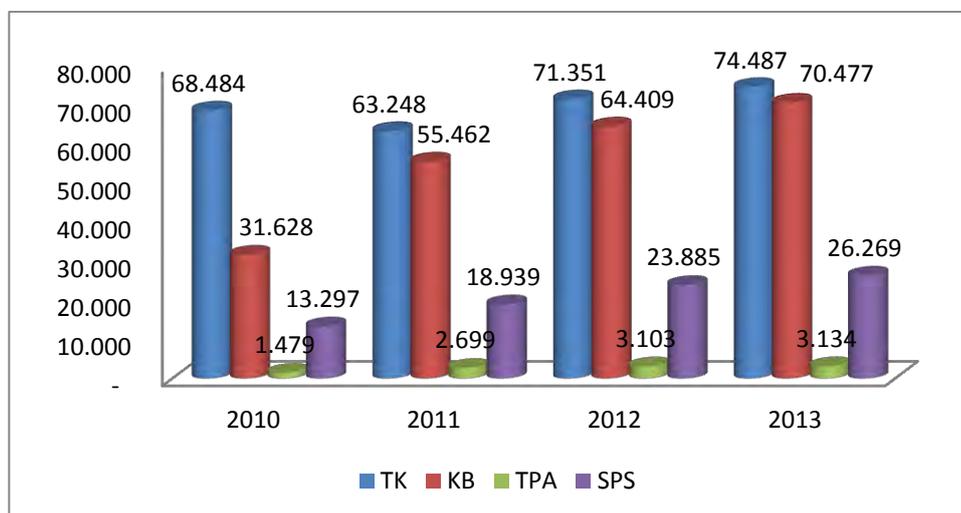
Grafik 3.2. Perkembangan Desa yang Belum ada PAUD



Sumber data: Pendataan online Ditjen PAUDNI, 2013

Untuk melihat tren perkembangan jumlah lembaga PAUD dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 sebagai berikut.

Grafik 3.3. Perkembangan Lembaga PAUD



Sumber data: Pendataan online Ditjen PAUDNI, 2013

Sosialisasi program PAUD di daerah berhasil dengan cukup signifikan dengan adanya program Bunda PAUD baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Pada tahun 2013 tercatat 31 Provinsi dan 240 Kabupaten/kota telah memiliki Bunda PAUD, dan pada 2013 tahun yang sama telah diselenggarakan lomba Bunda PAUD Tingkat Nasional dan terpilih sebagai juara I Bunda PAUD dari

Provinsi Riau, Juara II Bunda PAUD dari Provinsi Lampung dan Juara III dari Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Juara I Bunda PAUD di tingkat Kabupaten/kota adalah Bunda PAUD Kab. Lamandau, Juara II Bunda PAUD dari Kota Bontang dan Juara III dari Kota Yogyakarta. Pada umumnya mereka telah mengalokasikan dana APBD TK I dan TK II untuk pelaksanaan program PAUD yang mengarah pada peningkatan mutu dan sosialisasi, yaitu berupa pelatihan pada pendidik dan insentif pendidik PAUD, BOP yang ada di tingkat kabupaten/kota dan Provinsi.

Meskipun target tercapai, namun masih ditemukan sejumlah kendala atau hambatan antara lain penurunan jumlah anggaran yang cukup signifikan dua tahun terakhir. Selain itu hambatan dan kendala lain yang dihadapi tersebut di atas beberapa langkah antisipasi yang akan dilakukan di masa datang adalah:

- a) Masih disusunnya SPM (Standar Pelayanan Minimal) PAUD sehingga dapat mengikat daerah untuk lebih fokus dalam pengembangan PAUD di daerah dengan upaya memasukan PAUD dalam renstrada.
- b) Memperbanyak pelatihan di tingkat daerah dengan adanya diklat berjenjang. Pada tahun 2013 telah dimulai menyusun standar sarana dan prasarana untuk PAUD, terutama untuk alat permainan edukatif (APE).

2. Sasaran Strategis 2: Anak lulus SMP tidak melanjutkan, putus dan/atau lulus sekolah menengah tidak melanjutkan mendapatkan layanan pendidikan keterampilan.

Untuk melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui tingkat pencapaian IKU "Persentase anak lulus SMP tidak melanjutkan, putus dan/atau lulus sekolah menengah tidak melanjutkan mendapatkan layanan pendidikan keterampilan". Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Anak lulus SMP tidak melanjutkan, putus dan atau lulus sekolah menengah tidak melanjutkan mendapatkan layanan pendidikan keterampilan	Persentase Anak Lulus SMP Tidak Melanjutkan, Putus dan/ atau Lulus Sekolah Menengah Tidak Melanjutkan Mendapatkan Layanan Pendidikan Keterampilan	12%	8,40%	13%	8,17%	15%	4,74%	31,6	3,46%	3,43%	99,13

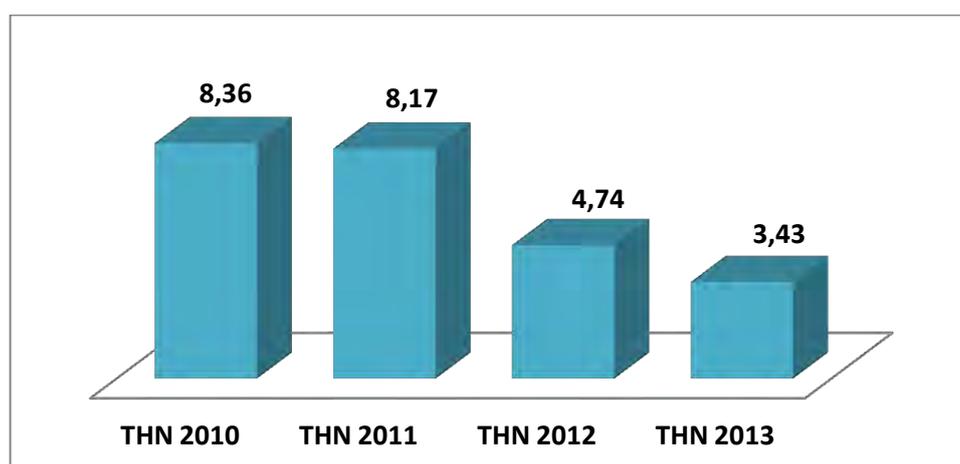
Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa **persentase anak lulus SMP tidak melanjutkan, putus dan/atau lulus sekolah menengah tidak melanjutkan mendapatkan layanan pendidikan keterampilan** yang ditargetkan sebesar 3,46% atau sebanyak 51.900 orang dari 1,5 juta sasaran, hingga akhir Desember 2013, hanya mencapai 3,43% atau sebesar 51.465 orang, dengan persentase kinerja 99,13%. Dibanding dengan tahun 2012 persentase kinerja tahun 2013 mengalami kenaikan 67,53%.

Perealisasi target tahun 2013 tersebut dilakukan melalui pelaksanaan program pemberian BOP pendidikan kecakapan hidup (PKH) sebanyak 29.470 orang dari target 29.000 orang, pemberian BOP pendidikan kewirausahaan masyarakat (PKM) sebanyak 11.120 orang dari target 11.000 orang, dan pemberian BOP desa vokasi sebanyak 10.875 orang dari target 11.000 orang.

No.	Program	Rencana	Realisasi	%
1.	PKH	29.000 org	29.470 org	101.62
2.	PKM	11.000 org	11.120 org	101,09
3.	Desa Vokasi	11.000 org	10.875 org	98.86
Jumlah		51.000 org	51.465 org	100.91

Berikut tren grafik anak lulus SMP tidak melanjutkan, putus sekolah atau lulusan sekolah menengah tidak melanjutkan yang mendapatkan layanan pendidikan keterampilan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013.

Grafik 3.4. Persentase realisasi peserta kursus dan pelatihan berbasis PKH



Sumber data: Dit Kursus dan Pelatihan, 2013

Ketidaktercapaian target sasaran ini dikarenakan dukungan anggaran dari APBN yang disediakan untuk penyelenggaraan program hanya mampu melayani 51.000 orang dari 51.900 orang yang telah ditetapkan dalam Renstra. Namun berdasarkan sasaran kinerja tahunan, dari 51.000 orang tersebut dapat tercapai

hingga 51.465 orang atau sebesar 100,91%. Capaian ini melampaui target penetapan kinerja sebagaimana ditetapkan.

Keberhasilan Ditjen PAUDNI melalui Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan melebihi target sasaran sebanyak 465 orang tersebut, dicapai melalui upaya menurunkan *unit cost* pada jenis-jenis keterampilan tertentu, sehingga dapat memperbanyak jumlah peserta didik. Penurunan *unit cost* tersebut tidak menyebabkan menurunnya kualitas penyelenggaraan program.

Selain itu upaya lain yang telah dilakukan untuk mengantisipasi masalah ini adalah menyesuaikan jumlah target sasaran sesuai dengan anggaran yang tersedia serta memperkecil *unit cost* untuk penyelenggaraan program Pendidikan Kecakapan Hidup, Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat, dan Program Desa Vokasi agar sasaran yang dilayani mendekati jumlah yang ditargetkan.

3. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Jumlah Lulusan Kursus dan Pelatihan yang bersertifikat Kompetensi

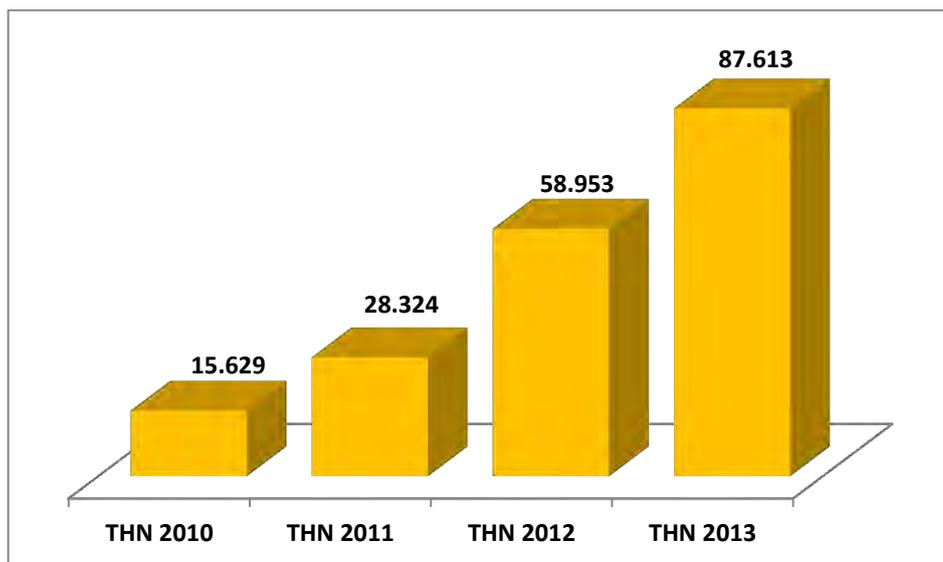
Untuk melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui tingkat pencapaian IKU “**Jumlah Peserta Didik Kursus dan Pelatihan Memperoleh Sertifikat Kompetensi**”. Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Jumlah Lulusan Kursus dan Pelatihan yang bersertifikat Kompetensi	Jumlah Peserta Didik Kursus dan Pelatihan Memperoleh Sertifikat Kompetensi	20.000	15.629	30.000	28.324	40.000	58.953	147,38	10.000	11.473	114,73

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa **Jumlah Peserta Didik Kursus dan Pelatihan Memperoleh Sertifikat Kompetensi** yang ditargetkan sebesar 10.000 orang, terealisasi menjadi 11.473 orang, dengan persentase kinerja 114,73%. Capaian tahun 2013 tersebut bila dikumulasikan dengan capaian dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 secara total berjumlah 87.613 orang. Dengan demikian capaian IKU ini melampaui target renstra maupun target penetapan kinerja sebagaimana ditetapkan.

Berikut tren grafik Jumlah Peserta Didik Kursus dan Pelatihan Memperoleh Sertifikat Kompetensi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013.

Grifik 3.5. Jumlah peserta didik kursus dan pelatihan memperoleh sertifikasi kompetensi



Sumber data: Dit Kursus dan Pelatihan, 2013

4. Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Program Keahlian Lembaga Kursus dan Pelatihan Berakreditasi

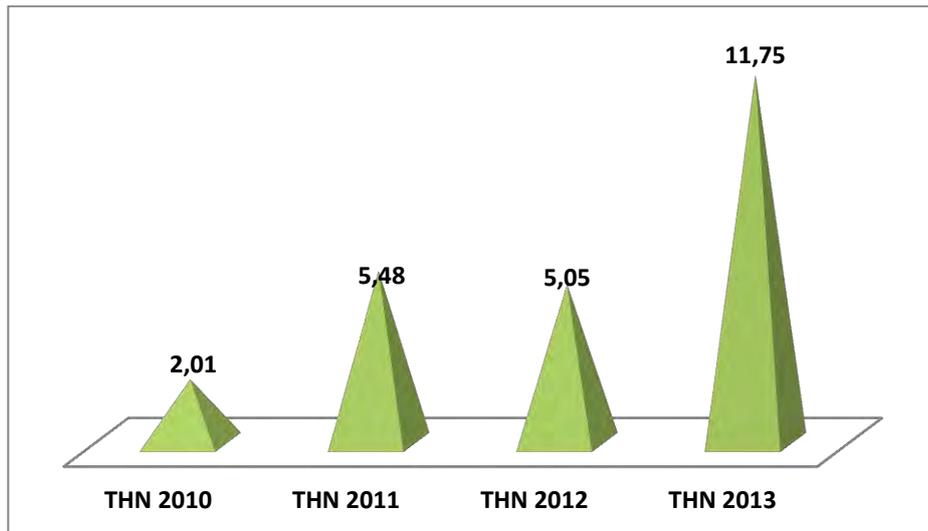
Untuk melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui tingkat pencapaian IKU "Persentase lembaga kursus dan pelatihan berkinerja A dan B". Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya lembaga kursus dan pelatihan berkinerja A dan B	Persentase lembaga kursus dan pelatihan berkinerja A dan B	2%	3,45%	5%	5,48%	10%	8,64%	8,64	9%	11,75%	130,6

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa **IKU "persentase lembaga kursus dan pelatihan berkinerja A dan B"** yang ditargetkan sebesar 9% atau sebanyak 2.100 lembaga dari total 5.387 lembaga sasaran, hingga akhir Desember 2013, terealisasi 11,75% atau sebanyak 633 lembaga, dengan kinerja 130,6%. Dibanding tahun 2012, persentase kinerja tahun 2013 mengalami peningkatan yang cukup tajam 121,96%.

Berikut tren grafik persentase lembaga kursus dan pelatihan berkinerja A dan B dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013.

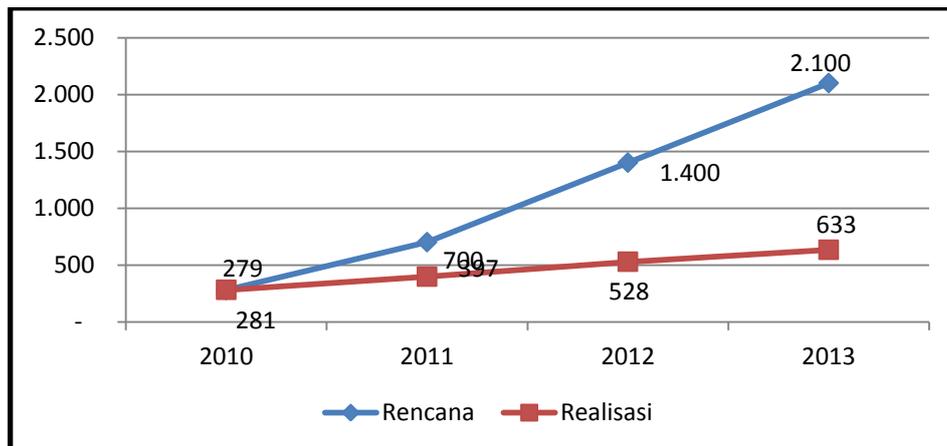
Grafik 3.6. Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan Berkinerja A dan B



Sumber data: Dit Kursus dan Pelatihan, 2013

Secara absolut jumlah lembaga kursus dan pelatihan berkinerja A dan B dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, dapat digambarkan seperti grafik berikut.

Grafik 3.7. Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Berkinerja A dan B



Sumber data: Dit Kursus dan Pelatihan, 2013

Keberhasilan IKU ini diperoleh Ditjen PAUDNI melalui Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan yaitu dengan mendorong lembaga kursus dan pelatihan yang berkinerja C dan D meningkatkan mutu manajemen penyelenggaraan lembaga dengan program revitalisasi sarana kursus dan pelatihan serta pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (BOP-LKP), sehingga menjadi lembaga yang berkinerja A dan B. Berdasarkan tren capaian tersebut di atas, terlihat setiap tahunnya meningkat yaitu sebanyak 528 lembaga pada tahun 2012 menjadi 633 lembaga tahun 2013 atau ada penambahan sebanyak 105 lembaga.

5. Sasaran Strategis 5: Menurunnya penduduk tuna aksara usia dewasa

Untuk melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dapat dilihat melalui tingkat pencapaian IKU: "Persentase penduduk tuna aksara usia dewasa". Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Menurunnya penduduk tuna aksara usia dewasa	Persentase penduduk tuna aksara usia dewasa	5%	4,75%	4,80%	4,43%	4,23%	4,21%	100,47	4,03%	4.03%	100

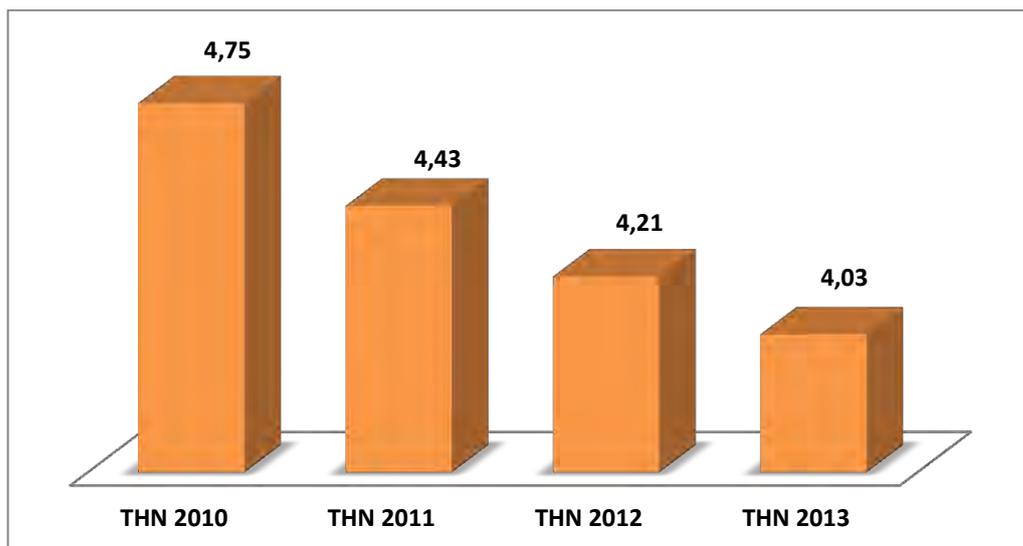
Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa **IKU "Persentase penduduk tuna aksara usia dewasa"** telah berhasil dicapai, hal tersebut dapat terlihat pada tahun 2012 Kemdikbud melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat telah mampu menurunkan angka penduduk tuna aksara usia 15-59 tahun menjadi 4,21% melebihi target yang ditetapkan 4,23% dan pada tahun 2013 juga berhasil menurunkan kembali menjadi 4,03% sesuai dengan target yang ditetapkan 4,03% dengan persentase capaian 100%.

Penurunan angka tuna aksara tersebut merupakan kumulasi capaian tahun 2012, di mana jumlah tuna aksara usia 15-59 tahun adalah sebesar 4,21% atau sebanyak 6.401.522 orang, kemudian pada tahun 2013 target yang dibelajarkan sebanyak 273.700 orang, sehingga jumlah penduduk tuna aksara menurun dari 6.401.522 orang tahun 2012 menjadi 6.127.822 orang atau 4,03% tahun 2013.

Capaian angka penurunan tuna aksara sebanyak 273.700 orang diperoleh melalui dukungan APBN dan APBD sebagai berikut: 1) APBN sebanyak 198.790 orang yaitu, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membelajarkan sebanyak 188.320 orang (termasuk 55.000 KD Layanan Khusus) dan Kementerian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal membelajarkan sebanyak 10.470 orang di 18 kabupaten; 2) APBD I di provinsi sebanyak 66.890 orang, yaitu: Jawa Barat 25.000 orang, Jawa Timur 13.000, Bali 2.500 orang, Nusa Tenggara Barat 10.000 orang, Sulawesi Selatan 12.390 orang, Sulawesi Barat 4.000 orang; dan 3) APBD II sebanyak 8.020 orang, yaitu: di Kab. Paliwali Mandar 4.000 orang, Kab. Sampang 2.000 orang, Kab. Situbondo 1.020 orang, Kota Serang 250 orang, Kab. Serang 60 orang, Kab. Lebak 690 orang).

Berikut tren penduduk tuna aksara usia 15-59 tahun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013.

Grafik 3.8. Persentase menurunnya penduduk tuna aksara usia 15-59 tahun



Sumber data: Susenas dan Dit. Dikmas, 2013

Keberhasilan pencapaian kinerja ini melalui pelaksanaan sosialisasi di kantong-kantong tuna aksara dan pelaksanaan komponen-komponen: (a) melakukan sosialisasi di kantong-kantong buta aksara, yaitu di Papua dan di daerah 3T, yang ditindaklanjuti dengan memprioritaskan pelaksanaan keaksaraan dasar, dan (b) pelaksanaan komponen-komponen yang secara fisik telah dapat dilakukan 100%. Komponen-komponen tersebut adalah:

1) Keaksaraan Dasar (KD)

Suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan penduduk tuna aksara menjadi melek aksara sehingga dapat membaca-menulis-berhitung secara sederhana.

2) Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)

Hasil penuntasan tuna aksara melalui keaksaraan dasar ditindaklanjuti dengan upaya pemeliharaan keberaksaraan melalui KUM. Prinsip dari pembelajaran KUM adalah meningkatkan kemampuan keberaksaraan dengan melatih berbagai keterampilan bermatapencaharian. Pada tahun 2013 dengan dana APBN telah dibelajarkan melalui KUM sebanyak 141.020 orang. Sehingga sejak tahun 2008 sampai dengan 2013 telah dibelajarkan melalui KUM sebanyak 1.476.996 orang atau 17,76% dari 8.318.605 pemegang SUKMA (Surat Keterangan Melek Aksara). Ini artinya bahwa Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat telah mampu mencapai target menurunkan persentase penduduk usia 15-59 tahun pemegang SUKMA mengikuti KUM 17,76% dari 17,50%.

3) Keaksaraan Dasar Layanan Khusus (KD-LK)

Keaksaraan Dasar Layanan Khusus pada prinsipnya sama dengan Keaksaraan Dasar poin 1 di atas, namun memiliki kekhususan untuk masyarakat 3T (Terluar, Terpencil dan Tertinggal) dan daerah-daerah lain yang mempunyai kondisi kemarjinalan tertentu seperti Papua dan NTT. Pada tahun 2013 KD-LK telah membelajarkan 55.000 orang dari target 55.000 orang atau kinerja mencapai 100%.

4) KUM Layanan Khusus

Keaksaraan Usaha Mandiri Layanan Khusus (KUM-LK) pada prinsipnya sama dengan Keaksaraan Usaha Mandiri poin 2 di atas, namun memiliki kekhususan untuk masyarakat 3T (Terluar, Terpencil dan Tertinggal) dan daerah-daerah lain yang mempunyai kondisi kemarjinalan tertentu melalui pembelajaran produktif dan keterampilan bermatapencarian yang dapat meningkatkan keberaksaraan dan penghasilan peserta didik secara individu maupun kelompok. Pada tahun 2013 KUM-LK telah membelajarkan 3.000 orang dari target 3.000 orang atau kinerja mencapai 100%.

5) Pendidikan Karakter Satuan PNF

Pendidikan karakter melalui satuan PNF merupakan pendidikan karakter yang diselenggarakan melalui pusat kegiatan belajar masyarakat dengan mengenalkan 8 nilai dari 18 nilai pendidikan karakter. kedelapan nilai tersebut adalah: (1) religius, (2) toleransi, (3) tanggung jawab dan disiplin, (4) kreatif, (5) kerja keras, (6) jujur dan adil, (7) Bhinneka Tunggal Ika, dan (8) Cinta Tanah Air. Pendidikan karakter ini diharapkan mampu menyadarkan para warga belajar untuk selalu belajar dan belajar khususnya bagi warga belajar pendidikan keaksaraan dasar. Dari target 60 lembaga tahun 2013 telah terealisasi sebanyak 60 lembaga atau capaian kinerja 100%.

6) Peningkatan Budaya Tulis melalui koran Ibu, koran anak, dan cerita rakyat

Peningkatan Budaya Tulis melalui koran Ibu, koran anak, dan cerita rakyat merupakan afirmasi pelatihan jurnalis kepada peserta didik perempuan (koran ibu) dan anak-anak (koran anak) dalam rangka memberikan penguatan keberaksaraan sekaligus sebagai media informasi, komunikasi, dan pembelajaran teknologi. Program ini sebagai upaya untuk mencegah tuna aksara kembali.

7) Kecakapan Hidup Perempuan

Kecakapan Hidup Perempuan merupakan pendidikan yang memberikan bekal dasar kecakapan sosial, personal, akademik, dan keterampilan kepada perempuan dewasa yang berkeaksaraan rendah.

Selain itu, untuk mendukung ketercapaian sasaran juga melaksanakan komponen lain yang tidak secara langsung menurunkan angka tuna aksara tetapi mempunyai pengaruh besar terhadap penurunan tingkat buta aksara, yaitu: 1) Orientasi Penyelenggaraan Program Pendidikan Keaksaraan, 2) Hari Aksara Internasional, 3) peningkatan kapasitas tutor keaksaraan, dan (4) Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Keaksaraan.

Meskipun target IKU yang ditetapkan dapat tercapai, namun dalam usaha menurunkan penduduk tuna aksara, masih ditemui beberapa hambatan dan kendala, di antaranya adalah lembaga penyelenggara pendidikan keaksaraan kesulitan membentuk kelompok belajar pendidikan keaksaraan dengan jumlah warga belajar sepuluh orang karena faktor kondisi geografis dan jarak tempat tinggal yang berjauhan.

Meskipun target Penetapan Kinerja dan renstra tercapai, namun masih ditemukan sejumlah hambatan/kendala antara lain:

- a. Proposal usulan dari provinsi Papua, Papua Barat dan daerah 3T lainnya yang diprioritaskan, sebagian besar tidak memenuhi persyaratan dan kriteria juknis .
- b. Kesulitan melakukan MoU dengan lembaga penerima bansos.
- c. Kesulitan membentuk kelompok belajar pendidikan keaksaraan dengan jumlah warga belajar 10 orang yang disebabkan karena 1) kondisi geografis, 2) jarak tempat tinggal yang berjauhan.
- d. Untuk melaksanakan kebijakan dengan prioritas pada daerah 3 T, tetapi proposal dari dari daerah 3 T dan daerah prioritas lainnya sangat kurang dan pada umumnya kurang layak.

Untuk mengatasi hal tersebut, langkah antisipasi yang dilakukan agar target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2014 tercapai adalah dengan strategi mengelompokkan sasaran yang akan digarap tidak mesti berjumlah sepuluh orang dan memberikan afirmasi atau intervensi kepada daerah-daerah 3T dan daerah prioritas lainnya.

6. Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Jumlah Kab/Kota yang telah Mengarusutamakan Gender Bidang Pendidikan

Untuk melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dapat dilihat melalui tingkat pencapaian IKU: **“Persentase Kab/Kota yang Telah Menerapkan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan”**. Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Jumlah Kab/Kota yang Telah Menerapkan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan	Persentase Kab/Kota yang Telah Menerapkan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan	14%	15,69%	23%	48,70%	54%	57,34%	117,7	61%	64,78%	106,2

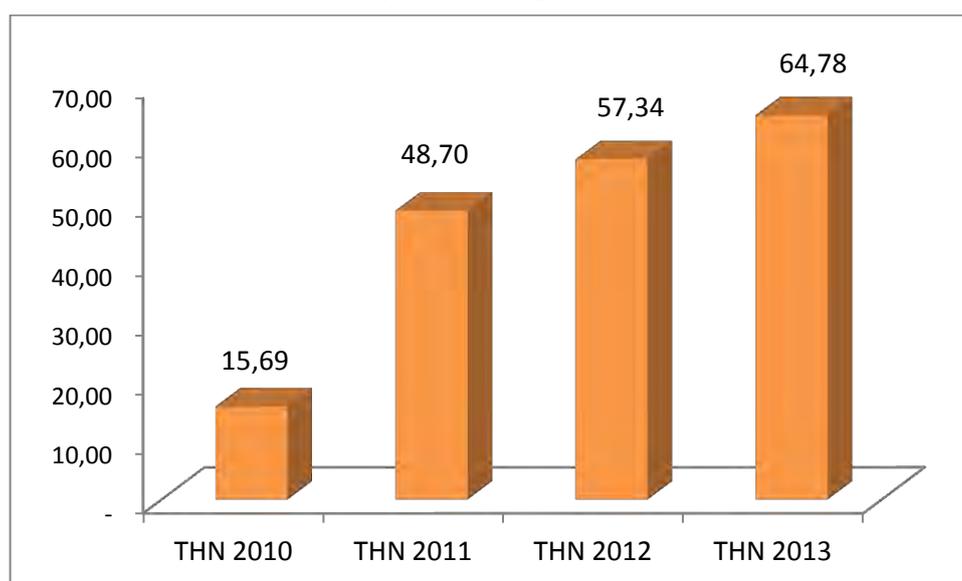
Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa **IKU “Persentase Kab/Kota yang Telah Menerapkan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan”** telah berhasil dicapai. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2012 Kemdikbud melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat telah mampu mendorong kabupaten/kota untuk menerapkan pengarusutamaan gender bidang pendidikan mencapai angka 57,34% atau 285 kabupaten/kota dari 497 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Sedangkan target yang ditetapkan tahun 2013 sebesar 61.00%, telah tercapai 64,78% atau 322 kab/kota dari 497 kab/kota. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target dilakukan melalui pemberian bantuan Penguatan Kapasitas Kelompok Kerja PUG Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota kepada kabupaten/kota yang belum menerapkan PUG bidang pendidikan, yang berjumlah 37 kabupaten/kota, sehingga bantuan tersebut dapat disalurkan 100%.

Keberhasilan pencapaian target dikarenakan: 1) pemberian bantuan Peningkatan Kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan diprioritaskan kepada kabupaten yang belum memiliki Pokja PUG Bidang Pendidikan, 2) Pokja PUG Bidang Pendidikan Provinsi yang menerima bantuan Peningkatan Kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan Provinsi diberi kewajiban untuk membentuk dan/atau membina paling sedikit 2 (dua) Pokja PUG Bidang Kab/Kota di wilayahnya, dan 3) melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada Pokja PUG Bidang Pendidikan Provinsi maupun Kab/kota.

Disamping itu juga dilakukan upaya-upaya pendukung seperti pemberian bantuan Penguatan Kapasitas Kelompok Kerja PUG Bidang Pendidikan Provinsi kepada 23 Provinsi, pemberian bantuan Penguatan Kapasitas Pusat Studi Gender/Wanita kepada 5 perguruan tinggi, bantuan pendidikan keluarga berwawasan gender kepada 90 lembaga. Upaya lain dilakukan melalui kegiatan-kegiatan: (a) orientasi lembaga penyelenggara pendidikan keluarga berwawasan gender, (b) Pertemuan Koordinasi PUG Bidang Pendidikan Lintas Sektor, (c) Pendampingan/bimbingan teknis PUG bidang pendidikan, (d) Pengadaan Bahan Sosialisasi PUG, dan (e) Semiloka Peningkatan Kapasitas dan Mutu Kelembagaan PUG Bidang Pendidikan.

Berikut tren grafik persentase kab/Kota yang telah menerapkan pengarus-utamaan gender bidang pendidikan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013.

Grafik 3.9. Persentase kab/Kota yang telah menerapkan pengarusutamaan gender bidang pendidikan



Sumber data: Dit. Dikmas, 2013

7. Sasaran Strategis 7: Meningkatnya Kab/Kota yang memberikan layanan fasilitasi Pendidikan Keorangtuan (*Parenting Education*)

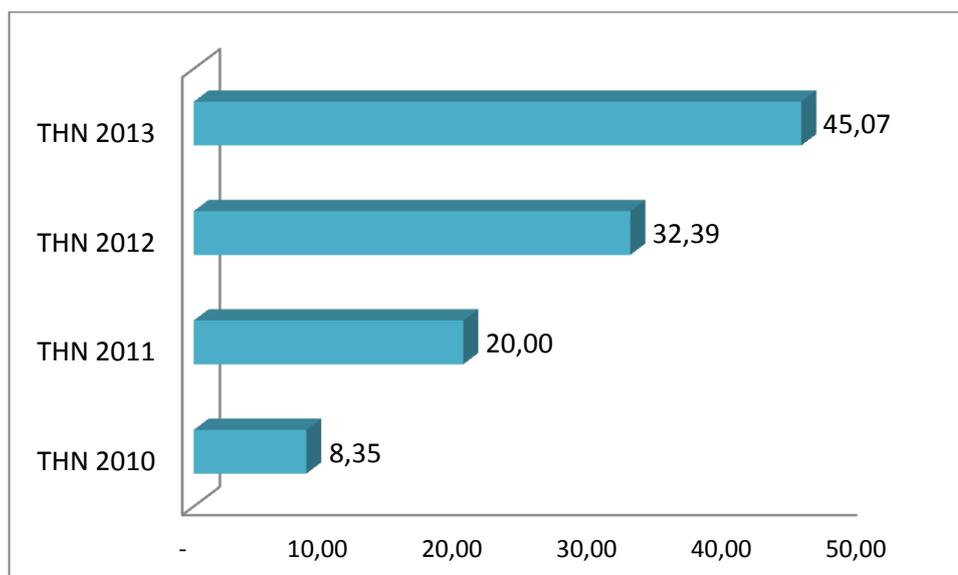
Untuk melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dapat dilihat melalui tingkat pencapaian IKU: "Persentase Kab/Kota yang telah Menyelenggarakan Pendidikan Keorangtuan (*Parenting Education*)". Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kab/Kota yang memberikan layanan fasilitasi Pendidikan Keorangtuanan (Parenting Education)	Persentase Kab/Kota yang telah menyelenggarakan Pendidikan Keorangtuanan (Parenting Education)	0	8,35%	10%	20%	30%	32,39%	107,97	40%	45,07%	112,68

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis meningkatnya Kab/Kota yang memberikan layanan fasilitasi Pendidikan Keorangtuanan (*Parenting Education*) capaian realisasinya didukung IKU Persentase Kab/Kota yang telah menyelenggarakan program pendidikan keorangtuanan (*Parenting Education*) dengan target fisik 40%, terealisasi sebesar 45,07% atau sebanyak 224 Kab/Kota. Jumlah 224 kab/kota tersebut merupakan kumulatif capaian 2012 sebanyak 161 lembaga yang tersebar di 161 kabupaten/kota atau 32,39% ditambah dengan tahun 2013 dengan sasaran 70 lembaga yang disebar di 70 kabupaten/kota sehingga menjadi 224 kabupaten/kota atau 45,07%.

Berikut tren grafik Persentase Kab/Kota yang telah menyelenggarakan program pendidikan keorangtuanan (*Parenting Education*) dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013.

Grafik 3.10. Persentase kab/kota yang menyelenggarakan program Pendidikan Keorangtuanan (*Parenting Education*)



Sumber data: Dit. Dikmas, 2013

Keberhasilan capaian yang melebihi target ini karena adanya pemberian bantuan pendidikan kecakapan keorngtuaan yang diprioritaskan bagi kabupaten/kota yang belum menyelenggarakan kecakapan keorngtuaan, dan lembaga penerima bantuan peningkatan kapasitas Pokja PUG Bidang Pendidikan Provinsi yang berjumlah 23 lembaga diberi kewajiban untuk melakukan pembinaan dan bimbingan kepada Pokja PUG Bidang Kab/kota di wilayah kerjanya.

8. Sasaran Strategis 8: Meningkatnya Jumlah PKBM Berakreditasi

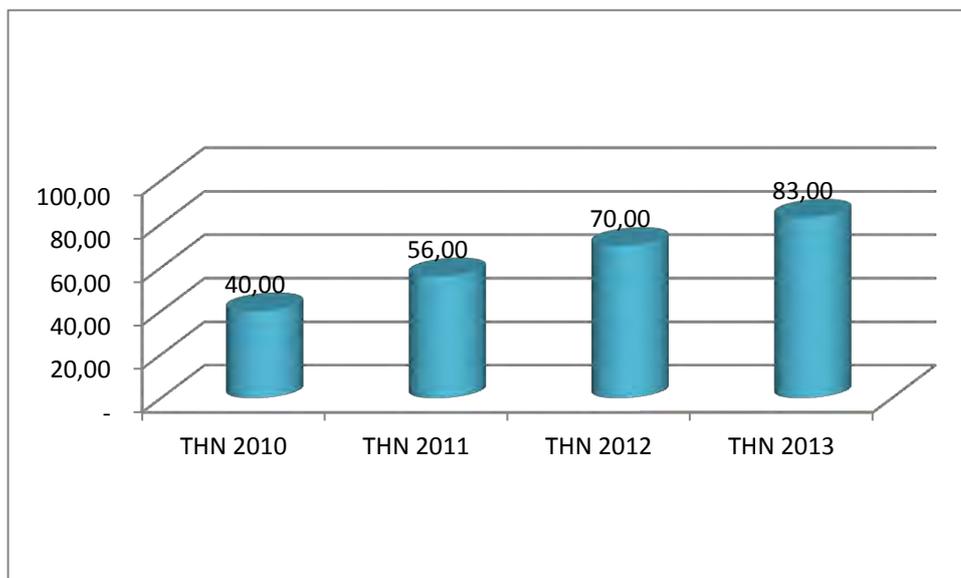
Untuk melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dapat dilihat melalui tingkat pencapaian IKU: "Persentase PKBM ber-Nomor Induk Lembaga". Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Jumlah PKBM berakreditasi	Persentase PKBM ber-Nomor Induk Lembaga	40%	40%	50%	56%	60%	59,95%	99,91	70%	83%	118,57

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis meningkatnya Jumlah PKBM Berakreditasi capaian realisasinya didukung oleh IKU Persentase PKBM ber-Nomor Induk Lembaga (ber-nilem). Sesuai dengan Tusi, Dit Bindikmas melakukan pembinaan PKBM untuk mendapatkan akreditasi melalui program PKBM ber-nilem. Pada tahun 2012 target 60,0% terealisasi sebesar 59,95% atau 6.554 lembaga dari 10.932 lembaga, dengan persentase kinerja 99,91%. Sedangkan pada tahun 2013 dengan target 70,0% dapat terealisasi sebesar 83,0% atau 6,620 lembaga dari 7.978 lembaga, dengan persentase kinerja 118,57%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2012, capaian tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 18,66%. Jumlah PKBM tahun 2013 mengalami penurunan dibanding tahun 2012 setelah dilakukan verifikasi dan validasi lembaga PKBM (dari 10.932 lembaga menjadi 9.898 lembaga).

Berikut tren grafik Persentase PKBM ber-Nomor Induk Lembaga dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013.

Grafik 3.11. Persentase PKBM ber-Nomor Induk Lembaga



Sumber data: Dit. Dikmas, 2013

Keberhasilan pencapaian target melebihi target yang ditetapkan ini disebabkan: 1) adanya penyempurnaan sistem aplikasi nomor induk lembaga (Nilem) PKBM yang memudahkan melakukan entri data, 2) melakukan sosialisasi Nilem PKBM di setiap kegiatan pendidikan masyarakat, dan 3) menyelenggarakan Peningkatan Kapasitas Petugas Nilem.

Meskipun target tercapai, namun masih ada kendala yaitu belum semua PKBM dapat mengakses aplikasi PKBM ber-nilem. Untuk itu langkah ke depan mengatasi hambatan/kendala tersebut adalah membuat aplikasi PKBM ber-nilem *offline*.

9. Sasaran Strategis 9: Meningkatnya Kab/Kota yang telah Memiliki Minimal 10 TBM

Untuk melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dapat dilihat melalui tingkat pencapaian IKU: **"Persentase Kab/Kota yang telah Memiliki Minimal 10 TBM"**. Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kab/Kota yang telah Memiliki Minimal 10 TBM	Persentase kab/kota yang memiliki minimal 10 TBM	24%	25%	35%	36%	47%	47,19%	100,4	59%	59%	100

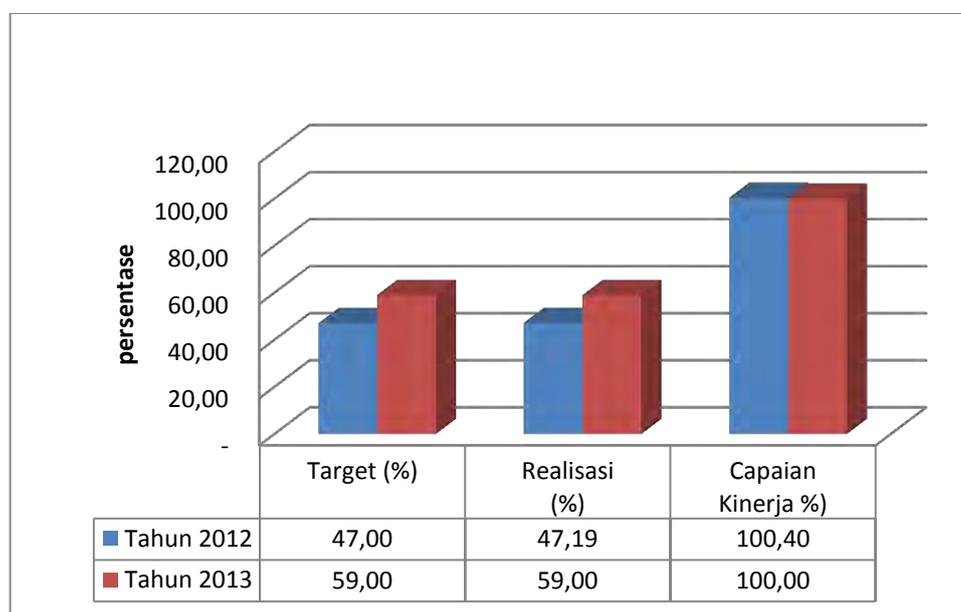
Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa **IKU “Persentase Kab/Kota yang telah Memiliki Minimal 10 TBM”** yang ditargetkan sebesar 59%, telah terealisasi sebanyak 59% atau 294 kab/kota, dengan persentase kinerja 100%. Jumlah tersebut merupakan kumulasi dari capaian tahun 2012 sebanyak 235 kab/kota atau 47,19% dan capaian tahun 2013 sebanyak 59 kab/kota.

TBM merupakan media untuk melaksanakan program peningkatan minat dan budaya baca masyarakat sebagai bekal dasar menguasai berbagai informasi dan keterampilan untuk hidup produktif dan mandiri.

Keberhasilan pencapaian target ini karena adanya pemberian bantuan TBM Rintisan sebanyak 420 unit, yang diprioritaskan bagi kabupaten/kota yang belum memiliki 10 TBM. Sehingga dengan pemberian bantuan TBM Rintisan tersebut kab/kota yang bersangkutan memiliki 10 TBM. Walaupun target tercapai masih terdapat kendala antara lain sulitnya mendorong lembaga di kab/kota untuk melaksanakan program TBM.

Berikut tren grafik persentase Kab/Kota yang telah Memiliki Minimal 10 TBM dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013.

Grafik 3.12. Persentase Kab/Kota yang telah Memiliki Minimal 10 TBM



Sumber data: Dit. Dikmas, 2013

10. Sasaran Strategis 10: Meningkatnya Jumlah PTK PAUDNI yang Bersertifikat Kompetensi

Untuk melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dapat dilihat melalui tingkat pencapaian IKU: **“Persentase PTK PAUDNI yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi”**. Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Jumlah PTK PAUDNI yang Bersertifikat Kompetensi	Persentase PTK PAUDNI yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	11,75%		20,41%	20,41%	12,55%	19,17%	152,7	16,23%	18,36%	113,25

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa **IKU “Persentase PTK PAUDNI yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi”** telah tercapai. Pada tahun 2012 dengan target 12,55% dapat terealisasi sebesar 19,17% dengan persentase capaian kinerja 152,70%. Sedangkan pada tahun 2013 target yang ditetapkan sebesar 16,23% atau 61.345 hingga akhir Desember 2013, terealisasi 18,36% atau 69.380 orang, dengan persentase capaian kinerja 113,10%.

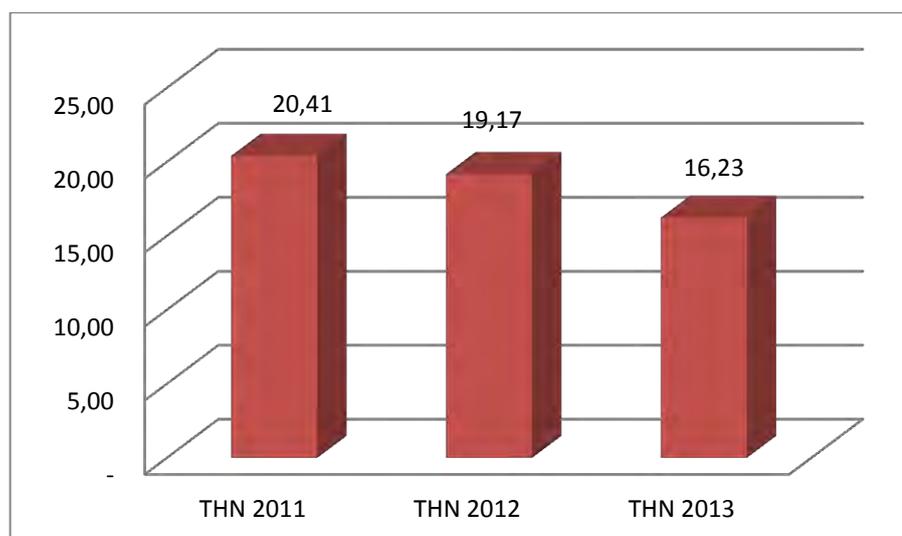
Keberhasilan pencapaian IKU Persentase PTK PAUDNI mengikuti peningkatan kompetensi dan kualifikasi S1/D4 disebabkan antara lain:

- 1) Dit. PPTK PAUDNI mengeluarkan kebijakan diklat berjenjang bagi PTK PAUD, yang hasil diklatnya bisa diakui (dikonversi SKS nya oleh Perguruan Tinggi/PT), sehingga Pemerintah Daerah, Organisasi Profesi dan masyarakat banyak yang berminat untuk mengikuti program tersebut;
- 2) Direktorat PPTK PAUDNI melalui anggaran APBN memberikan stimulasi berupa bansos untuk diklat berjenjang yang bisa diakses oleh masyarakat. Dampak dari bansos tersebut adalah adanya penambahan jumlah sasaran dari yang ditetapkan dalam juknis dimana anggarannya adalah *sharing budget* dengan masyarakat (guru mengikuti diklat secara mandiri, Pemerintah Daerah melalui APBD, Sharing budget dengan organisasi profesi/orsosmas dan program CSR dari perusahaan Kertas di Kaltim dan dari PNPM).
- 3) Untuk peningkatan kualifikasi S1/D4 melalui bantuan pendidikan bagi PTK PAUDNI pada tahun 2013 targetnya sebanyak 10.036 orang, terealisasi sebanyak 9.326 orang dengan rincian dari APBN sebanyak 7.259 dan dana APBD I Provinsi sebanyak 2.067 orang. Rinciannya Propinsi Jateng 1000 orang, Jabar 520 orang, Sultra 147 orang dan Sumsel sebanyak 400 orang sehingga total bantuan PTK PAUDNI

Dibandingkan dengan capaian tahun 2012, pada tahun 2013 ini terjadi penurunan capaian 39.6%, hal ini disebabkan: 1) program peningkatan kualifikasi yang direncanakan bekerjasama dengan 47 perguruan tinggi tidak dapat dilaksanakan terkendala adanya Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 81/05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga; 2) Diklat untuk calon penguji instruktur kursus dan penguji pengelola kursus tidak dilaksanakan karena tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan telah lulus dalam uji kompetensi instruktur dan pengelola yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) Instruktur dan Pengelola Kursus, karena LSK baru saja terbentuk sehingga belum siap dengan semua perangkat yang diperlukan dalam pelaksanaan uji kompetensi; 3) Diklat berjenjang kerjasama dengan orsosmas/ormit dan SKB tidak terserap semua karena lembaga/training provider yang mengajukan proposal tidak memenuhi persyaratan.

Berikut tren grafik persentase PTK PAUDNI yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013.

Grafik 3.13. Persentase PTK PAUDNI yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi



Sumber data: Dit. PTK PAUDNI, 2013

11. Sasaran Strategis 11: Meningkatnya Jumlah PTK PAUDNI yang memperoleh penghargaan

Untuk melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dapat dilihat melalui tingkat pencapaian IKU: **“Persentase PTK PAUDNI Memperoleh Penghargaan dan Peningkatan Kesejahteraan”**. Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

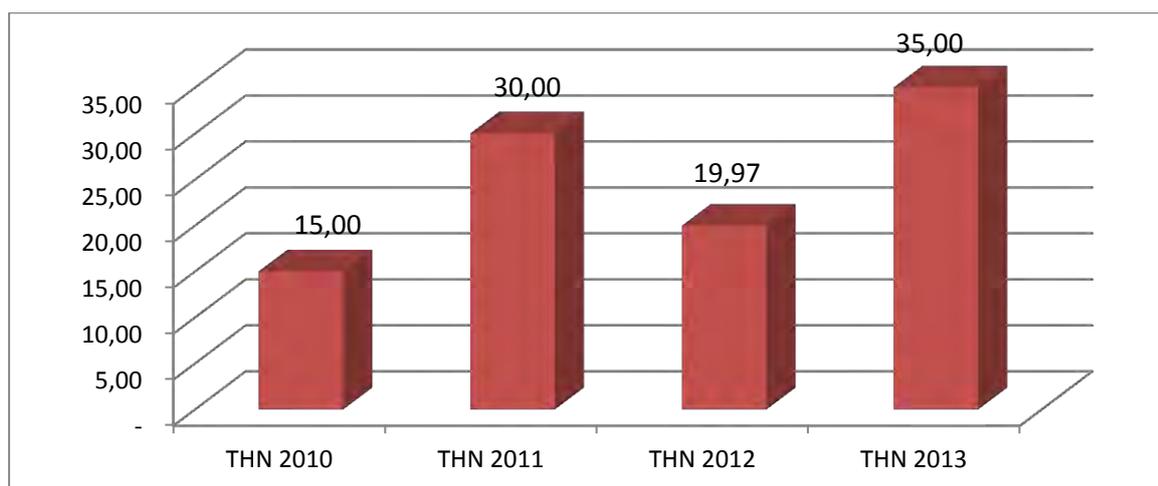
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Jumlah PTK PAUDNI yang memperoleh penghargaan dan peningkatan kesejahteraan	Persentase PTK PAUDNI Memperoleh Penghargaan dan Peningkatan Kesejahteraan	15%		15%	30%	35%	19,97%	57,06	19%	35%	184,21

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa IKU “**Persentase PTK PAUDNI Memperoleh Penghargaan dan Peningkatan Kesejahteraan**” telah tercapai. Pada tahun 2012 dengan target 18% dapat terealisasi sebesar 32% dengan persentase kinerja 178%. Sedangkan pada tahun 2013 target yang ditetapkan sebesar 19% atau 71.796 orang, hingga akhir Desember 2013, terealisasi 35% atau 132.633 orang, dengan persentase capaian 185%.

Dibandingkan dengan capaian tahun 2012, pada tahun 2013 ini terjadi kenaikan capaian 15,03%. Keberhasilan pencapaian IKU PTK PAUDNI memperoleh penghargaan dan peningkatan kesejahteraan diperoleh dari beberapa pelaksanaan program seperti: Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi, Guru Berprestasi, Pembayaran tunjangan profesi, tunjangan khusus, tunjangan guru bantu, tunjangan fungsional dan insentif bagi pendidik PAUD, Pamong Belajar dan Penilik.

Berikut tren grafik Persentase PTK PAUDNI Memperoleh Penghargaan dan Peningkatan Kesejahteraan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013.

Grafik 3.13. Persentase PTK PAUDNI Memperoleh Penghargaan dan Peningkatan Kesejahteraan



Sumber data: Dit. PTK PAUDNI, 2013

Meskipun target tercapai, masih terdapat kendala yaitu masih banyak guru PAUD di daerah yang belum mendapatkan insentif yang bersumber dari APBN.

Untuk itu upaya kebijakan dan strategi yang dilakukan Ditjen PAUDNI melalui Dit. PPTK PAUDNI antara lain:

- a. Melakukan optimalisasi anggaran tunjangan khusus, sehingga bisa menambah target sebanyak 1.839 orang realisasi 2.645 orang.
- b. Mendorong Pemda Provinsi dan Kab/Kota untuk menganggarkan dalam APBD;
Masalah lain yang terkait dengan tunjangan profesi guru TK Non PNS yaitu kekurangan pembayaran tunjangan selama 4 (empat) untuk 23.759 orang. Hal ini disebabkan karena kemampuan APBN hanya menyediakan untuk membayar lulusan sertifikasi tahun 2007 – 2011 sebanyak 10.417, namun dalam pelaksanaannya mengalami penambahan sasaran sebanyak 13.342 orang, berdasarkan data lulusan sertifikasi tahun 2012 dari Badan PPSDM.

12. Sasaran Strategis 12: Meningkatkan Program PAUDNI yang bermutu

Untuk melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dapat dilihat melalui tingkat pencapaian dua IKU: **“Jumlah Model dan Program PAUDNI yang Dikembangkan di Tingkat Regional”** dan **“Persentase Lembaga dan Program PAUDNI yang Mendapatkan Pemetaan Mutu”**. Adapun tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut.

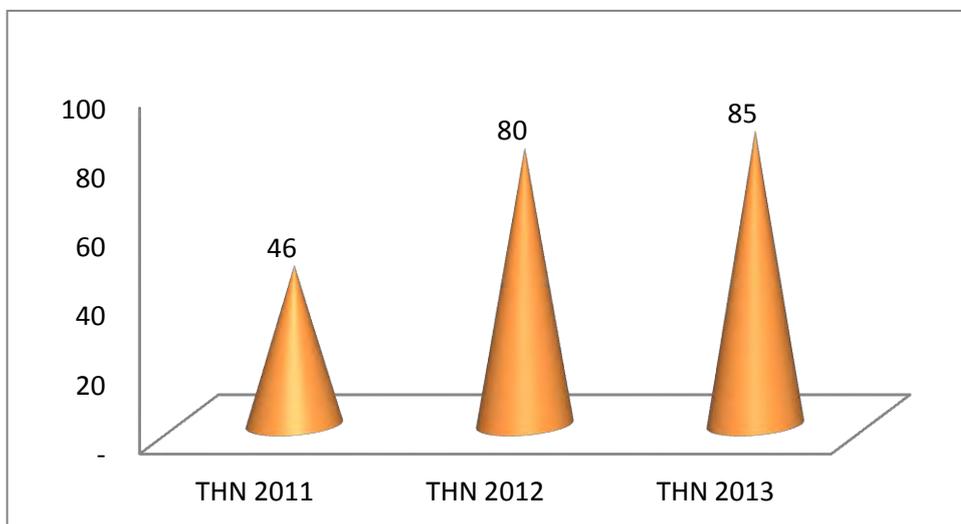
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012			Tahun 2013		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatkan Program PAUDNI yang bermutu	Jumlah Model dan Program PAUDNI yang Dikembangkan di Tingkat Regional	20		45	46	76	80	105,26	82	85	103,66
	Persentase Lembaga dan Program PAUDNI yang Mendapatkan Pemetaan Mutu	3%		6%	4,2%	10%	10%	100	14%	14%	100

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa IKU **“Jumlah Model dan Program PAUDNI yang Dikembangkan di Tingkat Regional”** yang ditargetkan sebesar 82 model, hingga akhir Desember 2013, terealisasi 85 model, dengan persentase kinerja 103,66%. Kemudian IKU **“Persentase Lembaga dan Program PAUDNI yang Mendapatkan Pemetaan Mutu”** yang ditargetkan sebesar 14%,

hingga akhir Desember 2013, terealisasi 14% atau 386 lembaga, dengan persentase kinerja 100%.

Berikut tren grafik Jumlah Model dan Program PAUDNI yang Dikembangkan di Tingkat Regional tahun 2010 sampai dengan tahun 2013.

Grafik 3.15. Jumlah Model dan Program PAUDNI yang dikembangkan



Sumber data: Ditjen PAUDNI, 2013

Meskipun target kinerja yang ditetapkan telah tercapai, namun dalam usaha meningkatkan nilai kemanfaatan model bagi masyarakat masih dijumpai beberapa hambatan dan kendala, diantaranya adalah: 1) belum semua dinas pendidikan provinsi maupun kab/kota mereplikasikan model tersebut, dan 2) rendahnya dukungan pemerintah daerah.

Melihat hambatan dan kendala tersebut di atas beberapa langkah ke depan yang akan dilakukan agar target kinerja ditetapkan tetap tercapai adalah: 1) melakukan sosialisasi dan diseminasi kemanfaatan model, dan 2) mendorong pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengoptimalkan sanggar kegiatan belajar (SKB) sebagai lembaga pengembangan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.

Daftar Model yang di kembangkan di Pusat/Balai Pengembangan PAUDNI

NO	UPT (PP-PAUDNI/BP-PAUDNI)	JUDUL MODEL					
		KURSUS		PAUD		DIKMAS	
A	PP-PAUDNI JAYAGIRI	1	Model Desa Vokasi Berbasis Seni Tradisional	1	Model PAUD Inklusi Tahun 2013	1	Keaksaraan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
		2	Model Pelatihan Kewirausahaan Bagi Anak Tidak sekolah	2	Model Permainan Sains Tahun 2013	2	Pengembangan Model Literasi Berbasis Teknologi Informasi di Cimahi

NO	UPT (PP-PAUDNI/BP-PAUDNI)	JUDUL MODEL		
		KURSUS	PAUD	DIKMAS
		3 Model Pendidikan Kewirausahaan Berbasis Pariwisata Melalui Pembelajaran Kontekstual	3 Model PIRA Tahun 2013	3 Pengembangan Model Revitalisasi PKBM Sentra TKI di Cianjur (Pend. Kerumahtanggaan)
		4 Pengembangan Desa Vokasi Berbasis Seni Budaya di Kab. Subang	4 Pengembangan APE Berbasis Sains dan Lingkungan Hidup di PAUD Terpadu (Pangkal Pinang)	4 Pengembangan Model Kecakapan Keorngtuaan Berbasis TBM di Kab. Bandung
		5 Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan Berbasis Pariwisata di Kab. Lebak Banten	5 Pengembangan Model penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Keorngtuaan di Daerah terpencil (Kab. Garut)	
		6 Pengembangan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Anak Tidak Sekolah di Kab. Majalengka	6 Pengembangan Pendidikan Informal Responsif AUD Bagi Keluarga muda (pasca nikah) di Kab. Bandung	
B	PP-PAUDNI SEMARANG	1 Model Kursus Kewirausahaan Masyarakat Bidang Organik dan Hortikultura	1 Model Penguatan Budaya Lokal melalui Metode Sentra dan Lingkaran Pada Pembelajaran Anak Usia Dini	1 Model Pembelajaran Komputer Untuk Warga Belajar KUM
		2 Model Kursus Pembudidayaan Hortikultura dalam rangka Mengembangkan Kemampuan Berwirausahaan Ibu-ibu Rumah Tangga	2 Model Penanaman Nilai-nilai kewirausahaan Pada Pembelajaran Anak Usia Dini	2 Upaya Pencegahan KDRT dan Eksploitasi Anak Melalui Metode Pembelajaran "SIMPATIK"
		3 Model PKH Berbasis Magang (Program Kursus Tata Boga Level III Juru Masak)	3 Model Penguatan Sentra Seni dan Kreativitas Dengan Menggambar Dekoratif dalam Pembelajaran Anak Usia Dini	3 Model Pelatihan Berbasis Keluarga dengan New Participant Approach untuk pencegahan NAPZA
		4 Kursus Boga Bidang Patiseri Terintegrasi Karakter Kewirausahaan	4 Model e-training Bagi Pendidik PAUD Tingkat Dasar I	4 Model Kampung Literasi
		5 Model Manajemen Mutu Pemasaran Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)	5 Model IHT (In House Training) Bagi Pendidik PAUD	5 Model Literasi Kesehatan Bagi Lansia (Lanjut Usia)
		6 Model Manajemen Mutu Sistem Informasi Manajemen Lembaga Kursus dan Pelatihan		6 Literasi Seni Budaya Untuk Pemberdayaan Masyarakat
		7 Model Kursus Para Profesi PKPP Sektor Informal Bidang Tatalaksana Rumah Tangga		7 Model Field Based Training Bagi Pendidik PAUDNI Melalui UPTD SKB
		8 Model Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Penatalaksana Rumah Tangga (PLRT) Penempatan Dalam Negeri		
		9 Model Rumah Terampil (menuju Masyarakat berbudaya Wirausaha)		
C	BP-PAUDNI MEDAN	1 Pengembangan Program LKP Percontohan	1 Program PAUD layanan Inklusi system Among	1 Pegembangan Program Peningkatan Kompetensi Profesional Tutor Pendidikan Keaksaraan dengan Metode Snow Balling Effect

NO	UPT (PP-PAUDNI/BP-PAUDNI)	JUDUL MODEL					
		KURSUS	PAUD	DIKMAS			
		2	Pengembangan Program Peningkatan Mutu Pengelolaan LKP Berbasis Kinerja Pola on the Spot	2	Program PAUD terintegrasi Pendidikan Kepramukaan bagi anak usia dini 4-6 tahun	2	Pengembangan Program Pencapaian Kompetensi Strategi Pemasaran Produk Melalui Model JIGSAW pada KUM
		3	Pengembangan Program Bimbingan Alumni Program PKM dengan Pendekatan Tukem (Tumbuh, Kembang, Mandiri)	3	Program pola asuh kemandirian anak usia 2-4 tahun di kelompok bermain		
				4	Program pemberdayaan orang tua dalam pembelajaran anak usia dini di kelompok bermain		
D	BP-PAUDNI SURABAYA	1	Model Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat Effectuation				
E	BP-PAUDNI MAKASSAR	1	Pengembangan Program Kursus <i>Babysitter</i>	1	Model Pendekatan Psikologis dalam Meningkatkan Kecerdasan Jamak Anak Usia Dini	1	Model Pendidikan Keaksaraan Responsif Gender
		2	Pengembangan Penyelenggaraan Program PKH Berdasarkan Identifikasi kebutuhan Belajar dan Keberbakatan Anakan Jalanan	2	Model Pembelajaran <i>softskill</i> melalui Metode Proyek Pada Anak Usia Dini di Daerah Kumuh/Marjinal	2	Pengembangan Program Keaksaraan Usaha Mandiri Berbasis Kewirausahaan (Pemberdayaan Perempuan Melalui Pengolahan Ikan)
		3	Pengembangan Wirausaha Melalui Manajemen Usaha Bagi Petani Cabai	3	Model PAUD Pranikah "Aju, Waju, Ukkaju"	3	Pengembangan Program Taman Bacaan Masyarakat "TBM Kearifan Lokal"
F	BP-PAUDNI BANJARBARU	1	Pengembangan Program Kelompok Usaha Masyarakat	1	Tari Kreasi "Zapen" sebagai Stimulasi Tumbuh Kembang Anak Tahun 2013	1	Pengembangan Program Pendampingan Partisipatif Pada KUM
G	BP-PAUDNI MATARAM	2	Pengembangan Program Pelatihan Penguatan Kelompok Usaha Kerajinan Kayu	2	Pengembangan program UPK PAUD (Usaha Peningkatan Kesehatan) dalam optimalisasi PAUD Holistik & integratif	1	Pengembangan Program Peningkatan Life Skill Perempuan Melalui Tenaga Pemberdaya Inti
H	BP-PAUDNI SENTANI	3	Pengembangan Program PKM Bidang Pembuatan Sandal Hotel Berbasis Unit Usaha dan Pasar			1	Model Bersama Mitra Menyelenggarakan Keaksaraan Dasar Terintegrasi Keterampilan Tahap II (Lanjutan)

Selain capaian di atas, prestasi lain yang diraih oleh Ditjen PAUDNI melalui Direktorat Pendidikan Masyarakat selama tahun 2013 adalah mendapat Anugerah Parahita Ekapraya Tingkat Madya dari Presiden Republik Indonesia atas prestasinya dalam melaksanakan Pengarus-utamaan Gender Bidang Pendidikan. Penghargaan ini diterima oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan secara berturut-turut sejak tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013.

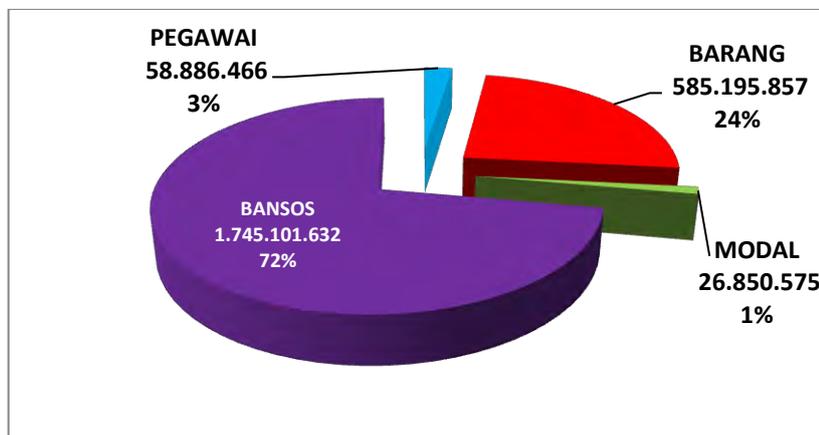
B. Akuntabilitas Keuangan

1. Pagu Anggaran

Secara keseluruhan pagu anggaran Ditjen PAUDNI tahun 2013 semula Rp 2.408.034.530.000,- (Dua Trilyun Empat Ratus Delapan Miliar Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) menjadi Rp 2.416.034.530.000,- (Dua Trilyun Empat Ratus Enam Belas Miliar Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah). Tambahan pagu tersebut berasal dari luncuran program P-PAUD yang bersumber dari Bank Dunia.

Alokasi untuk pos-pos pengeluaran tersebut dapat dilihat dari grafik berikut ini.

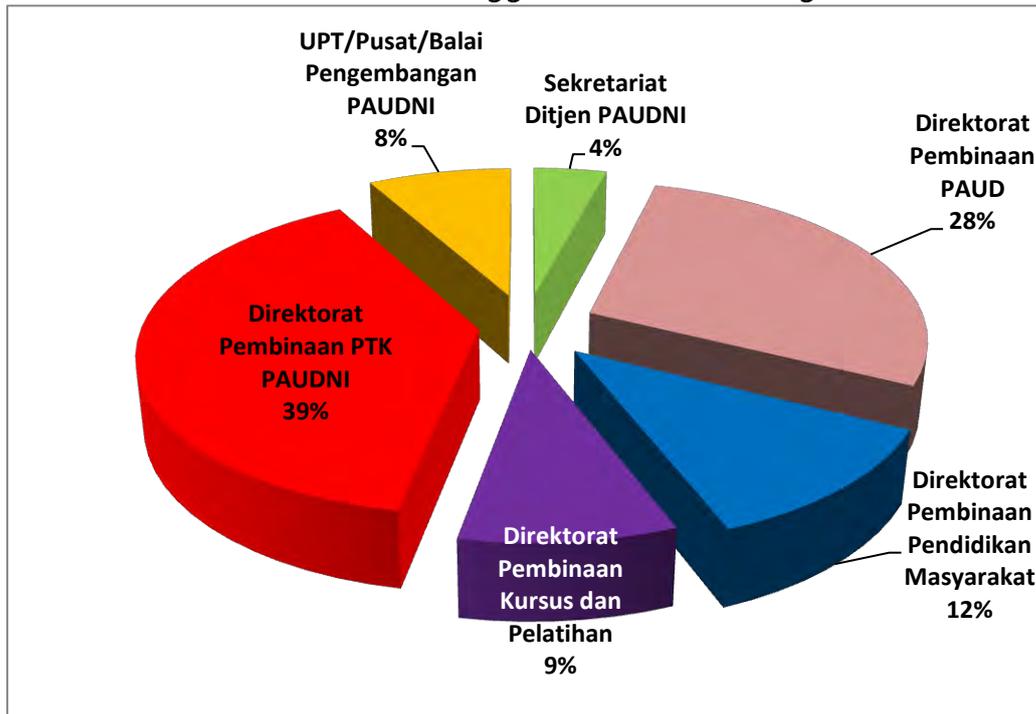
Grafik 3.16. Pagu Anggaran PAUDNI Per Jenis Belanja



Dari jumlah total pagu Ditjen PAUDNI tahun 2013 sebesar Rp 2.416.034.530.000, untuk Belanja Bantuan Sosial mendapatkan alokasi sebesar 72,23% (Rp1.745.101.632.000), Belanja Pegawai mendapatkan alokasi 2,44% (Rp 58.886.466.000), Belanja Barang mendapatkan alokasi 24,22% (Rp 585.195.857.000) dan Belanja Modal mendapatkan alokasi 1,11% (Rp 26.850.757.000).

Berdasarkan layanan kegiatan, distribusi anggaran PAUDNI seperti grafik berikut:

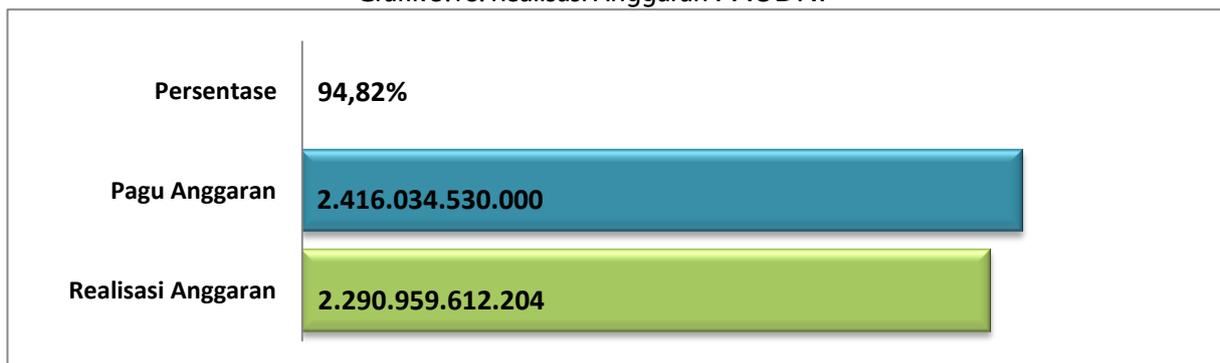
Grafik 3.17. Distribusi Anggaran PAUDNI Per Kegiatan



2. Realisasi anggaran

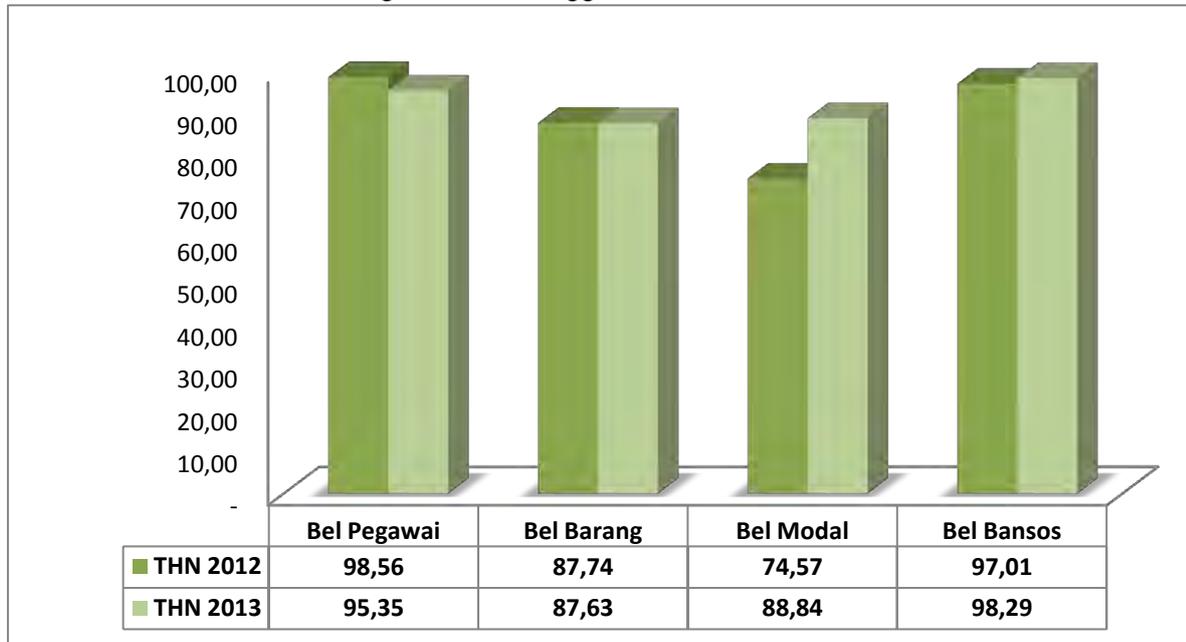
Dari total anggaran Ditjen PAUDNI yang ada dalam DIPA tahun 2013 berjumlah Rp 2.416.034.530.000, realisasi pengeluaran DIPA sampai dengan bulan Desember tahun 2013 adalah Rp 2.290.959.612.204,-. Sehingga daya serap anggaran Ditjen PAUDNI sampai dengan Desember 2013 adalah:

Grafik 3.18. Realisasi Anggaran PAUDNI



Berikut ini grafik yang memperlihatkan capaian keuangan per jenis belanja Ditjen PAUDNI, Tahun 2013 dibandingkan Tahun 2012:

Grafik 3.19. Perbandingan Realisasi Anggaran PAUDNI Tahun 2012 dan 2013



Dari grafik di atas terlihat capaian belanja bansos dan belanja pegawai memiliki daya serap relatif baik. Adapun secara keseluruhan daya serap setiap jenis belanja Ditjen PAUDNI sampai Desember 2013 yaitu Belanja Pegawai: Rp 56.147.339.844,- (95,35%) dari alokasi Rp 58.886.466.000, Belanja Barang: Rp 512.822.972.307,- (87,63) dari alokasi Rp 585.195.857.000,-, Belanja Modal: Rp 23.853.289.985 (88,84) dari alokasi Rp 26.850.757.000, dan Belanja Bansos: Rp 1.715.317.559.336 (98,29) dari alokasi Rp Rp1.745.101.632.000. Dibandingkan dengan daya serap tahun 2012, penyerapan anggaran tahun 2013 relatif lebih baik.

Meskipun daya serap Ditjen PAUDNI mencapai 94,82%, namun dalam pelaksanaan tahun 2013 ada beberapa hambatan/kendala yang menyebabkan penyerapan belanja barang rendah: 1) Operasional pelaksanaan DIPA dimulai pada pertengahan Mei; dan 2) Adanya efisiensi pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan tabel di bawah ini, terlihat kondisi serapan anggaran di lingkungan Ditjen PAUDNI sebagai berikut:

Kondisi Serapan Anggaran Ditjen PAUDNI Tahun 2013

No	Satuan Kerja	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	Sekretariat Ditjen PAUDNI	99.408.920.000	87.544.882.440	88,07	11.864.037.560
2	Direktorat Pembinaan PAUD	684.293.045.000	646.477.777.964	94,47	37.815.267.036
3	Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat	283.128.369.000	268.292.296.090	94,76	13.905.702.000
4	Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan	211.823.197.000	200.541.435.585	94,67	10.858.105.261
5	Direktorat Pembinaan PTK PAUDNI	942.139.377.000	900.611.115.887	95,59	41.928.261.113
6	UPT/Pusat/Balai Pengembangan PAUDNI	195.241.622.000	187.492.104.238	96,03	8.200.109.000
Total		2.416.034.530.000	2.290.959.612.204	94,82	141.931.113.737

Akuntabilitas keuangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap pelaporan kinerja yang dilakukan. Dari daya serap keuangan tersebut di atas, analisis akuntabilitas serapan keuangan per sasaran strategis seperti terlihat dibawah ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2013		%
		Alokasi	Realisasi	
Meningkatnya APK PAUD Kemendikbud	APK PAUD Kemendikbud	652.755.864.000	603.492.365.494	92,45

Alokasi anggaran untuk sasaran strategis Meningkatkan APK PAUD Kemdikbud adalah sebesar Rp 652.755.864.000,- yang terfokus pada satu indikator kinerja pendukung. Capaian realisasi dari alokasi anggaran tersebut adalah Rp 603.492.365494,- dengan persentase capaian sebesar 92,45%.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2013		%
		Alokasi	Realisasi	
Anak lulus SMP tidak melanjutkan, putus dan atau lulus sekolah menengah tidak melanjutkan mendapatkan layanan pendidikan keterampilan	Persentase Anak Lulus SMP Tidak Melanjutkan, Putus dan/ atau Lulus Sekolah Menengah Tidak Melanjutkan Mendapatkan Layanan Pendidikan Keterampilan	149.677.000.000 (108.672.291.000)	104.903.680.000	96,53

Alokasi anggaran untuk sasaran strategis Meningkatkan Layanan Pendidikan Keterampilan Bagi Anak Lulusan SMP Tidak Melanjutkan, Putus dan atau Lulus Sekolah Menengah Tidak Melanjutkan yang Mendapatkan Layanan Pendidikan Keterampilan adalah sebesar Rp 108.672.291000,- yang terfokus pada satu indikator kinerja pendukung. Capaian realisasi dari alokasi anggaran tersebut adalah Rp 104.903.680.000 dengan persentase anggaran sebesar 96,53%.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2013		%
		Alokasi	Realisasi	
Meningkatnya Jumlah Lulusan Kursus dan Pelatihan yang bersertifikat Kompetensi	Jumlah Peserta Didik Kursus dan Pelatihan Memperoleh Sertifikat Kompetensi	4.722.500.000	4.650.011.900	98,47

Alokasi anggaran untuk sasaran strategis Meningkatkan Jumlah Lulusan Kursus dan Pelatihan yang bersertifikat Kompetensi adalah sebesar Rp 4.722.500.000,- yang terfokus pada satu indikator kinerja pendukung. Capaian realisasi dari alokasi anggaran tersebut adalah Rp 4.650.011.900,- dengan persentase capaian sebesar 98,47%.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2013		%
		Alokasi	Realisasi	
Meningkatnya lembaga kursus dan pelatihan berkinerja A dan B	Persentase lembaga kursus dan pelatihan berkinerja A dan B	3.424.901.000	3.330.284.000	97,24

Alokasi anggaran untuk sasaran strategis Meningkatkan Program Keahlian Lembaga Kursus dan Pelatihan Berakreditasi adalah sebesar Rp 3.424.901.000 yang terfokus pada satu indikator kinerja pendukung. Capaian realisasi dari alokasi anggaran tersebut adalah Rp 3.330.284.000,- dengan persentase capaian sebesar 97,24%.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2013		%
		Alokasi	Realisasi	
Menurunnya penduduk tuna aksara usia dewasa	Persentase penduduk tuna aksara usia dewasa	156.560.704.000	156.149.530.000	99,74

Alokasi anggaran untuk sasaran strategis Menurunnya Tingkat Illiterasi Nasional Usia 15 Tahun adalah sebesar Rp 154.429.864.000 direvisi menjadi Rp 156.149.530.000,- yang terfokus pada satu indikator kinerja pendukung. Capaian realisasi dari alokasi anggaran tersebut adalah Rp 156.149.530.000,- dengan persentase capaian sebesar 99,74%.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2013		%
		Alokasi	Realisasi	
Meningkatnya Jumlah Kab/Kota yang Telah Mengarusutamakan Gender Bidang Pendidikan	Persentase Kab/Kota yang Telah Menerapkan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan	15.821.639.000	14.915.247.000	94,27

Alokasi anggaran untuk sasaran strategis Meningkatkan Jumlah Kab/Kota yang Telah Mengarusutamakan Gender Bidang Pendidikan adalah sebesar Rp 15.821.639.000,- yang terfokus pada satu indikator kinerja pendukung. Capaian realisasi dari alokasi anggaran tersebut adalah Rp 14.915.247.000,- dengan persentase capaian sebesar 94,27%.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2013		%
		Alokasi	Realisasi	
Meningkatnya Kab/Kota yang memberikan layanan fasilitasi Pendidikan Keorngtuaan (<i>Parenting Education</i>)	Persentase Kab/Kota yang telah Menyelenggarakan Pendidikan Keorngtuaan (<i>Parenting Education</i>)	5.806.677.000	5.365.587.000	92,40

Alokasi anggaran untuk sasaran strategis Meningkatkan Kab/Kota yang memberikan layanan fasilitasi Pendidikan Keorngtuaan (*Parenting Education*) adalah sebesar Rp 5.806.677.000,- yang terfokus pada satu indikator kinerja pendukung. Capaian realisasi dari alokasi anggaran tersebut adalah Rp 5.365.587.000,- dengan persentase capaian sebesar 92,40%.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2013		%
		Alokasi	Realisasi	
Meningkatnya Jumlah PKBM Berakreditasi	Persentase PKBM ber-Nomor Induk Lembaga	27.298.716.000	26.831.711.000	98,29

Alokasi anggaran untuk sasaran strategis Meningkatnya jumlah PKBM Berakreditasi adalah sebesar Rp 27.298.716.000,- yang terfokus pada satu indikator kinerja pendukung. Capaian realisasi dari alokasi anggaran tersebut adalah Rp 26.831.711.000,- dengan persentase capaian sebesar 98,29%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2013		%
		Alokasi	Realisasi	
Meningkatnya Kab/Kota yang telah Memiliki Minimal 10 TBM	Persentase kab/kota yang memiliki minimal 10 TBM	20.560.027.000	20.028.061.000	97,41

Alokasi anggaran untuk sasaran strategis Meningkatkan Kab/Kota yang telah Memiliki Minimal 10 TBM adalah sebesar Rp 20.560.027.000,- yang terfokus pada satu indikator kinerja pendukung. Capaian realisasi dari alokasi anggaran tersebut adalah Rp 20.028.061.000,- dengan persentase capaian sebesar 97,41%.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2013		%
		Alokasi	Realisasi	
Meningkatnya Jumlah PTK PAUDNI yang Bersertifikat Kompetensi	Persentase PTK PAUDNI yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	136.530.343.000	99.565.052.000	72,93

Alokasi anggaran untuk sasaran strategis Meningkatkan Jumlah PTK PAUDNI yang Bersertifikat Kompetensi adalah sebesar Rp 136.530.343.000,- yang terfokus pada satu indikator kinerja pendukung. Capaian realisasi dari alokasi anggaran tersebut adalah Rp 99.565.052.447,- dengan persentase capaian sebesar 72,93%.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2013		%
		Alokasi	Realisasi	
Meningkatnya Jumlah PTK PAUDNI yang memperoleh penghargaan	Persentase PTK PAUDNI Memperoleh Penghargaan dan Peningkatan Kesejahteraan	805.609.034.000	802.765.257.000	99,65

Alokasi anggaran untuk sasaran strategis Meningkatkan Jumlah PTK PAUDNI yang memperoleh penghargaan adalah sebesar Rp 805.609.034.000,- yang terfokus pada satu indikator kinerja pendukung. Capaian realisasi dari alokasi anggaran tersebut adalah Rp 802.765.257.136,- dengan persentase capaian sebesar 99,65%.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2013		%
		Alokasi	Realisasi	
Meningkatkan Program PAUDNI yang bermutu	Jumlah Model dan Program PAUDNI yang Dikembangkan di Tingkat Regional	9.261.889.000	8.480.786.175	91,57
	Persentase Lembaga dan Program PAUDNI yang Mendapatkan Pemetaan Mutu	2.805.839.000	2.219.488.000	79,10

Alokasi anggaran untuk sasaran strategis Meningkatkan Program PAUDNI yang bermutu yang tersebar pada dua indikator kinerja pendukung. Capaian realisasi dari alokasi anggaran tersebut adalah Jumlah Model dan Program PAUDNI yang Dikembangkan di Tingkat Regional dengan capaian realisasi anggaran sebesar 91,57% dari target Rp 9.261.889.000,- terealisasi Rp 8.480.786.175,- dan indikator kinerja Persentase Lembaga dan Program PAUDNI yang Mendapatkan Pemetaan Mutu dengan capaian realisasi anggaran sebesar 79,10% dari target Rp 2.805.839.000,- terealisasi Rp 2.219.488.000,-.

BAB IV

PENUTUP

LAKIP Ditjen PAUDNI Tahun 2013 merupakan cerminan kinerja yang dilaksanakan selama tahun 2013 yang merupakan media pertanggungjawaban dari upaya pencapaian sasaran strategis di tahun 2013. Pelaporan pertanggungjawaban bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel ini, menjadikan setiap komponen yang ada di lingkungan Ditjen PAUDNI melakukan tugas dan kinerja semaksimal mungkin namun tidak terlepas dari indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Selama tahun 2013, peran strategis Ditjen PAUDNI dalam pengelolaan tugas manajerial, pemantauan dan evaluasi terlihat sangat nyata melalui pemenuhan indikator kinerja yang dilaksanakan, dengan ditunjukkan adanya indikator kinerja yang harus mencapai target.

Pencapaian diperoleh melalui proses dan mekanisme yang baik, dimulai dari proses perencanaan, pengukuran kinerja hingga evaluasi mendalam dan menyeluruh terhadap seluruh hasil yang dicapai. Namun di balik itu masih ada beberapa sasaran strategis berikut indikator kinerja yang belum memenuhi target yang ditetapkan serta ekspektasi besar yang diharapkan. Hal ini disebabkan antara lain karena dalam proses pencapaian target dari beberapa indikator kinerja tersebut bergantung pada pihak/lembaga lain yang juga menjadi bagian dari pelaksanaan indikator kinerja terkait. Bahkan tak jarang penyelesaian target tersebut dilakukan secara simultan beriringan dengan proses yang dilakukan oleh pihak/lembaga lain tersebut.

**PENGUKURAN KINERJA
DITJEN JENDERAL PAUDNI TAHUN 2013**

Pengukuran Kinerja Ditjen PAUDNI Tahun 2013

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatkan APK PAUD Kemdikbud	APK PAUD Kemdikbud Usia 3-6 tahun	61%	68.10%	111.64	676.293.045.000 (652.755.864.000)	603.492.365.494	95,24
2	Meningkatnya Layanan Pendidikan Keterampilan Bagi Anak Lulusan SMP Tidak Melanjutkan, Putus dan atau Lulus Sekolah dan atau Lulus Sekolah Menengah Tidak Melanjutkan Menengah Tidak Melanjutkan yang Mendapatkan Layanan Pendidikan Keterampilan	Persentase Anak Lulus SMP Tidak Melanjutkan, Putus dan atau Lulus Sekolah Menengah Tidak Melanjutkan Mendapatkan Layanan Pendidikan Kecakapan Hidup	3,46%	3,43%	99,13	149.677.000.000 (108.672.291.000)	104.903.680.000	96,53
3	Meningkatnya Jumlah Lulusan Kursus dan Pelatihan yang bersertifikat Kompetensi	Jumlah Peserta Didik Kursus dan Pelatihan Memperoleh Sertifikat Kompetensi	10.000	11.473	114,73	4.722.500.000	4.650.011.900	98,47
4	Meningkatnya Program Keahlian Lembaga Kursus dan Pelatihan Berakreditasi	Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan Berkinerja A dan B	9%	11,75%	130,6	3.424.901.000	3.330.284.000	97,24

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
5 Menurunnya Tingkat Iliterasi Nasional Usia 15 Tahun	Persentase Penduduk Buta Aksara Usia 15-59 tahun	4,03 %	4.03%	100	156.560.704.000	156.149.530.000	99,74
6 Meningkatnya Jumlah Kab/Kota yang Telah Mengarusutamakan Gender Bidang Pendidikan	Persentase Kab/Kota yang Telah Menerapkan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan	61.00 %	64,78%	106,2	15.821.639.000	14.915.247.000	94,27
7 Meningkatnya Kab/Kota yang memberikan layanan fasilitas Pendidikan Keorangtuaan (<i>Parenting Education</i>)	Persentase Kab/Kota yang telah Menyelenggarakan Pendidikan Keorangtuaan (<i>Parenting Education</i>)	40.00 %	45,07%	112,68	5.806.677.000	5.365.587.000	92,40
8 Meningkatnya Jumlah PKBM berakreditasi	Persentase PKBM ber-Nomor Induk Lembaga	70.00 %	83,0%	118,57	27.298.716.000	26.831.711.000	98,29
9 Meningkatnya Kab/Kota yang telah Memiliki Minimal 10 TBM	Persentase Kab/Kota yang telah Memiliki Minimal 10 TBM	59%	59%	100	20.560.027.000	20.028.061.000	97,41
10 Meningkatnya Jumlah PTK PAUDNI yang Bersertifikat Kompetensi	Persentase PTK PAUDNI yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	16,23%	18.36%	113,25	136.530.343.000	99.565.052.000	72.93
11 Meningkatnya Jumlah PTK PAUDNI yang memperoleh penghargaan	Persentase PTK PAUDNI Memperoleh Penghargaan dan Peningkatan Kesejahteraan	19%	144,30%	759,47	805.609.034.000	802.765.257.000	99.65

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
12 Meningkatkan Program PAUDNI yang bermutu	Jumlah Model dan Program PAUDNI yang Dikembangkan di Tingkat Regional	82	85	103,66	9.261.889.000	8.480.786175	91,57
	Persentase Lembaga dan Program PAUDNI yang Mendapatkan Pemetaan Mutu	14%	14%	100	2.805.839.000	2.219.488.000	79,01

Lampiran 2: Realisasi Anggaran PAUDNI tahun 2013 Berdasarkan Layanan Kegiatan dan IKU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (dalam ribuan rupiah)		
			Pagu	Realisasi	%
	Program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal		2.416.034.530	2.290.959.610	94,82
1	Kegiatan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini		676.293.045	646.477.778	94,47
a	Meningkatkan APK PAUD Kemdikbud	APK PAUD Kemdikbud Usia 3-6 tahun	(684.293.045)		
2	Kegiatan Layanan Kursus dan Pelatihan		211.823.197	200.541.434	94,67
a	Meningkatnya Layanan Pendidikan Keterampilan Bagi Anak Lulus SMP Tidak Melanjutkan, Putus dan atau Lulus Sekolah Menengah Tidak Melanjutkan Mendapatkan Layanan Pendidikan Kecakapan Hidup	Persentase Anak Lulus SMP Tidak Melanjutkan, Putus dan atau Lulus Sekolah Menengah Tidak Melanjutkan Mendapatkan Layanan Pendidikan Kecakapan Hidup			
b	Meningkatnya Jumlah Lulusan Kursus dan Pelatihan yang bersertifikat Kompetensi	Jumlah Peserta Didik Kursus dan Pelatihan Memperoleh Sertifikat Kompetensi			
c	Meningkatnya Program Keahlian Lembaga Kursus dan Pelatihan Berakreditasi	Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan Berkinerja A dan B			
3	Kegiatan Layanan Pendidikan Masyarakat		283.128.369	268.292.296	94,76
a	Menurunnya Tingkat Iliterasi Nasional Usia 15 Tahun	Persentase Penduduk Buta Aksara Usia 15-59 tahun			

Lampiran 2: Realisasi Anggaran PAUDNI tahun 2013 Berdasarkan Layanan Kegiatan dan IKU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (dalam ribuan rupiah)	
			Pagu	Realisasi
				%
b	Meningkatnya Jumlah Kab/Kota yang telah Mengikuti Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan	Persentase Kab/Kota yang telah Menerapkan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan		
c	Meningkatnya Kab/Kota yang memberikan layanan fasilitas Pendidikan Keorangtuaan (<i>Parenting Education</i>)	Persentase Kab/Kota yang telah Menyelenggarakan Pendidikan Keorangtuaan (<i>Parenting Education</i>)		
d	Meningkatnya Jumlah PKBM berakreditasi	Persentase PKBM ber-Nomor Induk Lembaga		
e	Meningkatnya Kab/Kota yang telah Memiliki Minimal 10 TBM	Persentase Kab/Kota yang telah Memiliki Minimal 10 TBM		
4	Kegiatan Layanan PTK PAUDNI		942.139.377	95,59
a	Meningkatnya Jumlah PTK PAUDNI yang Bersertifikat Kompetensi	Persentase PTK PAUDNI yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi		
b	Meningkatnya Jumlah PTK PAUDNI yang memperoleh penghargaan	Persentase PTK PAUDNI Memperoleh Penghargaan dan Peningkatan Kesejahteraan		
5	Kegiatan Layanan Pengkajian dan Pengembangan Mutu PAUDNI		195.241.622	96,03
a	Meningkatnya Program PAUDNI yang bermutu	Jumlah Model dan Program PAUDNI yang Dikembangkan di Tingkat Regional	187.492.104	

Lampiran 2: Realisasi Anggaran PAUDNI tahun 2013 Berdasarkan Layanan Kegiatan dan IKU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (dalam ribuan rupiah)		
			Pagu	Realisasi	
				%	
5	Kegiatan Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUDNI	Persentase Lembaga dan Program PAUDNI yang Mendapatkan Pemetaan Mutu	99.408.920	87.544.882	88,07
		Jumlah dokumen Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUDNI			

**KONTRAK KINERJA
DIREKTUR JENDERAL PAUDNI**



Kontrak Kinerja **Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal** **dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan**

TUGAS

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pendidikan anak usia dini formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan tanggung jawab saya, saya akan:

1. Merumuskan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal;
2. Melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal;
3. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan anak usia dini formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal;
4. Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan anak usia dini formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal; dan
5. Melaksanakan administrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal.

TATA CARA KERJA

Dalam melaksanakan tugas sebagai Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, saya akan:

1. Menyusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2010-2014 dalam bentuk tahapan kerja dan rencana aksi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, yang saya pimpin, indikator kinerja utama beserta tenggat waktunya melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan semua Unit Utama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian terkait;
2. Melimpahkan sebagian kewenangan dan/atau tanggung jawab yang dimiliki oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal, kepada Unit Utama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai langkah untuk menerapkan *Resource Sharing* sesuai dengan perintah Menteri.
3. Memastikan tercapainya sasaran sesuai indikator kinerja utama oleh seluruh jajaran pejabat dalam lingkup tugas saya; dan
4. Memberikan laporan tentang progress penyerapan anggaran dan pencapaian kinerja secara periodik, khususnya pada bulan Juli dan Desember.

TARGET CAPAIAN

1. PROGRAM: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL, DAN INFORMAL

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran (Rp)
1	Meningkatkan APK PAUD Kemdikbud	APK PAUD Kemdikbud	61,00%	676.293.045.000
2	Meningkatkan Layanan Pendidikan Keterampilan Bagi Anak Lulusan SMP Tidak Melanjutkan, Putus dan atau Lulus Sekolah Menengah Tidak Melanjutkan yang Mendapatkan Layanan Pendidikan Keterampilan	Persentase Anak Lulus SMP Tidak Melanjutkan, Putus dan atau Lulus Sekolah Menengah Tidak Melanjutkan Mendapatkan Layanan Pendidikan Kecakapan Hidup	3,46%	149.677.000.000
3	Meningkatkan Jumlah Lulusan Kursus dan Pelatihan yang bersertifikat Kompetensi	Jumlah Peserta Didik Kursus dan Pelatihan Memperoleh Sertifikat Kompetensi	10.000	4.722.500.000
4	Meningkatkan Program Keahlian Lembaga Kursus dan Pelatihan Berakreditasi	Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan Berkinerja A dan B	9,00%	3.424.901.000
5	Menurunnya Tingkat Illiterasi Nasional Usia 15 Tahun	Persentase Penduduk Buta Aksara Usia 15-59 tahun	4,03%	154.429.864.000
6	Meningkatkan Jumlah Kab/Kota yang Telah Mengarusutamakan Gender Bidang Pendidikan	Persentase Kab/Kota yang Telah Menerapkan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan	61,00%	15.821.639.000
7	Meningkatkan Kab/Kota yang memberikan layanan fasilitasi <i>Parenting Education</i>	Persentase Kab/Kota yang telah Menyelenggarakan <i>Parenting Education</i>	40,00%	5.806.677.000
8	Meningkatkan Jumlah PKBM berakreditasi	Persentase PKBM ber-Nomor Induk Lembaga	70,00%	27.298.716.000
9	Meningkatkan Kab/Kota yang telah Memiliki Minimal 10 TBM	Persentase Kab/Kota yang telah Memiliki Minimal 10 TBM	59%	20.560.027.000
10	Meningkatkan Jumlah PTK PAUDNI yang Bersertifikat Kompetensi	Persentase PTK PAUDNI yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	16,23%	136.530.343.000
11	Meningkatkan Jumlah PTK PAUDNI yang memperoleh penghargaan	Persentase PTK PAUDNI Memperoleh Penghargaan dan Peningkatan Kesejahteraan	19%	805.609.034.000
12	Meningkatkan Program PAUDNI yang bermutu	Jumlah Model dan Program PAUDNI yang Dikembangkan di Tingkat Regional	82	9.784.150.000
		Persentase Lembaga dan Program PAUDNI yang Mendapatkan Pemetaan Mutu	14%	3.000.944.000
13	Memastikan capaian serapan anggaran Direktorat Jenderal PAUDNI tahun 2013 minimal seperti kurva di bawah;			

Jumlah Alokasi anggaran program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal sebesar Rp 2.408.034.530.000,-

2. Rencana penerapan Anggaran Program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal



RENCANA	JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES
Penyerapan Kumulatif	4.346	29.322	100.135	219.733	344.951	548.037	877.549	1.032.625	1.397.042	1.649.010	1.986.009	2.408.035
Penyerapan Per Bulan	4.346	24.976	70.813	119.598	125.218	203.085	329.512	155.076	364.416	251.969	336.999	422.025
Persentase	0,18%	1,22%	4,16%	9,13%	14,33%	22,76%	36,44%	42,88%	58,02%	68,48%	82,47%	100,00%

EVALUASI DAN KONSEKUENSI

Bersedia mengambil langkah-langkah proaktif pengunduran diri atau diberhentikan dari jabatan sebagai bentuk tanggung jawab profesional dan hasil evaluasi apabila:

1. Hasil evaluasi tahunan jauh dari sasaran yang ditetapkan
2. Melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun terhadap butir-butir Kontrak Kinerja

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Mohammad Nuh

Jakarta, Februari 2013
Direktur Jenderal PAUDNI

Lydia Freyani Hawadi

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
DIREKTORAT JENDERAL PAUDNI
TAHUN 2013**



RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT ORGANISASI ESELON I KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Instansi/Unit Kerja : Ditjen PAUDNI
Tahun : 2013

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatkan APK PAUD Kemdikbud	APK PAUD Kemdikbud	61,00%
Meningkatkan Layanan Pendidikan Keterampilan Bagi Anak Lulusan SMP Tidak Melanjutkan, Putus dan atau Lulus Sekolah Menengah Tidak Melanjutkan yang Mendapatkan Layanan Pendidikan Keterampilan	Persentase Anak Lulus SMP Tidak Melanjutkan, Putus dan atau Lulus Sekolah Menengah Tidak Melanjutkan Mendapatkan Layanan Pendidikan Kecakapan Hidup	3,46%
Meningkatkan Jumlah Lulusan Kursus dan Pelatihan yang bersertifikat Kompetensi	Jumlah Peserta Didik Kursus dan Pelatihan Memperoleh Sertifikat Kompetensi	10
Meningkatkan Program Keahlian Lembaga Kursus dan Pelatihan Berakreditasi	Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan Berkinerja A dan B	9,00%
Menurunnya Tingkat Illiterasi Nasional Usia 15 Tahun	Persentase Penduduk Buta Aksara Usia 15-59 tahun	4,03%
Meningkatkan Jumlah Kab/Kota yang Telah Mengarusutamakan Gender Bidang Pendidikan	Persentase Kab/Kota yang Telah Menerapkan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan	61,00%
Meningkatkan Kab/Kota yang memberikan layanan fasilitasi Pendidikan Keorangtuan (<i>Parenting Education</i>)	Persentase Kab/Kota yang telah Menyelenggarakan Pendidikan Keorangtuan (<i>Parenting Education</i>)	40,00%
Meningkatkan Jumlah PKBM berakreditasi	Persentase PKBM ber-Nomor Induk Lembaga	70,00%
Meningkatkan Kab/Kota yang telah Memiliki Minimal 10 TBM	Persentase Kab/Kota yang telah Memiliki Minimal 10 TBM	59%
Meningkatkan Jumlah PTK PAUDNI yang Bersertifikat Kompetensi	Persentase PTK PAUDNI yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	16,23%
Meningkatkan Jumlah PTK PAUDNI yang memperoleh penghargaan	Persentase PTK PAUDNI Memperoleh Penghargaan dan Peningkatan Kesejahteraan	19%
Meningkatkan Program PAUDNI yang bermutu	Jumlah Model dan Program PAUDNI yang Dikembangkan di Tingkat Regional	82
	Persentase Lembaga dan Program PAUDNI yang Mendapatkan Pemetaan Mutu	14%